



Rancangan Akhir
RENCANA KERJA
(RENJA)
2027

Pengusunan
Tahun 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, Alhamdulillah Penyusunan Laporan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) ini juga di susun aspiratif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Semuanya bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) ini kami ucapkan terimah kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan Rahmat Nya kepada kita semua.

Terima Kasih

Mamuju, September 2026

Kepala Dinas



AKHMAD TAUFIQ, S.Ip, M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP : 19790102 201101 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 6

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025 6

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 36

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027
berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
RKPD 2027, dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025, dan Kondisi Dinamis 36

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 62

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan
Kepada Masyarakat 62

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 63

3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian 63

3.2 Arah Kebijakan 65

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 71

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027 71

4.2 Rencana Kerja Untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah 89

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 91

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 91

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 92

BAB VI PENUTUP 93

6.1 Catatan Penting 93

6.2 Kaidah Pelaksanaan 94

6.3 Rencana Tindak Lanjut 95

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1.	Tabel 2.1 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	7
2.	Tabel 2.2 Pelayanan Informasi Keliling dan Sound System Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025	7
3.	Tabel 2.3 Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Setelah Dilakukan Pendataan Kembali Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025	9
4.	Tabel 2.4 Laporan Hasil Diseminasi Informasi Terkait Penanganan Stunting Di Kabupaten Mamuju Tahun 2025	10
5.	Tabel 2.5 Laporan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Sosial dan Website Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	12
6.	Tabel 2.6 Jumlah Kerjasama Media Cetak dan Media Online Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025	12
7.	Tabel 2.7 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	15
8.	Tabel 2.8 Laporan Rekapitulasi Fasilitas ZoomMeeting Tahun 2025	16
9.	Tabel 2.9 Data BlankSpot Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	16
10.	Tabel 2.10 Usulan Titik Blank Spot Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025	18
11.	Tabel 2.11 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	23
12.	Tabel 2.12 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	28
13.	Tabel 2.13 Data Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai Tahun 2025	29
14.	Tabel 2.14 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	33
15.	Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah TABEL T-C.30.	34
16.	Tabel 2.16 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2026 TABEL T-C.29.	57

17.	Tabel 2.17	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Mamuju TABEL T-C..32.	62
18.	Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Tahun 2027	64
19.	Tabel 4.1	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 TABEL T-C.31.	72
20.	Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian TABEL T-C.33.	83
21.	Tabel 4.3	Pentahapan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	89
22.	Tabel 4.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	90
23.	Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	91
24.	Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	92

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar		Halaman
1.	Gambar 2.1	Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025	6
2.	Gambar 2.2	Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR-SP4N Tahun 2025	14
3.	Gambar 2.3	Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah	22
4.	Gambar 2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	23
5.	Gambar 2.5	Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	24
6.	Gambar 2.6	Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Perangkat Daerah Dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2025	26
7.	Gambar 2.7	Pembinaan Statistik Sektorial Oleh Pembina Data Kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	27
8.	Gambar 2.8	Laporan Kegiatan Pengelolaan Email SANAPATI Tahun 2025	30
9.	Gambar 2.9	Laporan Assessment Indeks Keamanan Informas (IKAMI) Versi 5.0 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	31
10.	Gambar 2.10	Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 360 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Mamuju	32
11.	Gambar 2.11	Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025	45
12.	Gambar 2.12	Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan RENJA Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi

pedoman dalam penyusunan RAPBD Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 23).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2027 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan arah pengembangan e-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat yang cepat dan transparan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Mamuju Tahun 2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi :

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.

2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi :

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan :

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan :

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi :

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

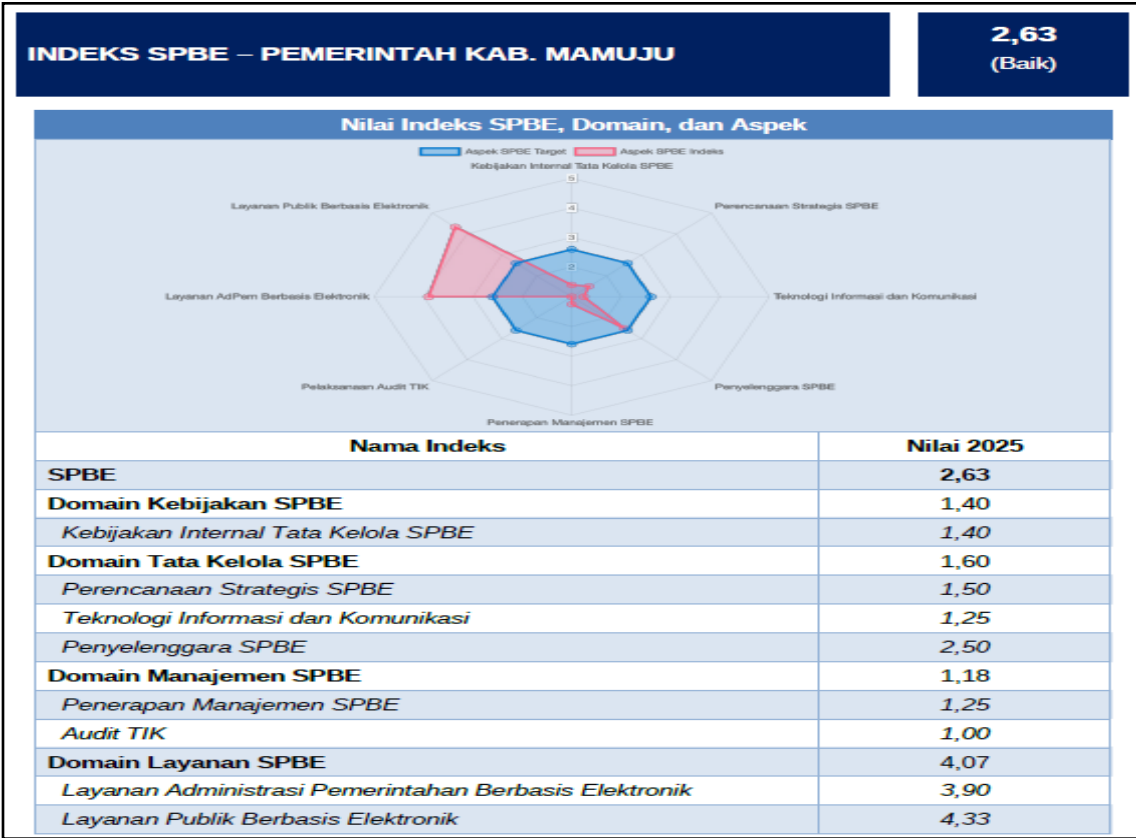
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025

Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan yang dijabarkan dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja yang mendukung. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan, berupa dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029. Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai sesuai yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja (PK) 2025 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Hasil analisis tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan komunikasi dan informatika secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

Gambar 2.1

Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025



Sumber Data : Kementerian PAN-RB, 2025

a. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat

Tabel 2.1
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	84 %	100 %

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya Penyebaran Informasi terkait dengan Pencegahan Stunting, Sosialisasi Sampah dan Diseminasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tepat Waktu melalui penyebaran informasi pengumuman kendaraan keliling sebanyak 13 kali selama setahun;
2. Terlaksananya pelayanan Sound System sebanyak 8 kali untuk kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;

Tabel 2.2
Pelayanan Informasi Keliling dan Sound System Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025

NO.	DASAR KEGIATAN	TANGGAL	KECAMATAN	KEGIATAN
1	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	17 Februari 2025	Tapalang	Pelayanan sound system pada acara Karnaval Mobil Hias Tingkat Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh IGTKI
2	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	18 Februari 2025	Tapalang Barat	Pelayanan sound system dalam rangka Launching 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SD Negeri 1 Mamuju
3	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	19 Februari 2025	Mamuju	Pelayanan sound system di Stadion Mansakarra dalam rangka penutupan Open Turnamen Sepak Bola Mansakarra Cup 2 Tahun 2025
4	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	19 Februari 2025	Simboro	Diseminasi Informasi dengan tema Pencegahan Stunting, Makanan Sehat untuk Ibu Hamil, Anak Sehat dan Cerdas
5	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	21 Februari 2025	Kalukku	Diseminasi Informasi dengan tema Ayo bayar PBB, Pencegahan Stunting, Makanan Sehat untuk Ibu Hamil, Anak Sehat dan Cerdas

6	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/800.1.1.1/10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025	22 Februari 2025	Mamuju	Diseminasi Informasi dengan tema Jaga Kebersihan Pantai arteri dan Anjungan Manakarra
7	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/000.1.2.3/37/II/2025 tanggal 26 Februari 2025	26 Februari 2025	Papalang	Diseminasi Informasi dengan tema Ayo bayar PBB, Pencegahan Stunting, Makanan Sehat untuk Ibu Hamil, Anak Sehat dan Cerdas
8	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/000.1.2.3/37/II/2025 tanggal 26 Februari 2025	27 Februari 2025	Mamuju	Diseminasi Informasi dengan tema Ayo bayar PBB, Pencegahan Stunting, Makanan Sehat untuk Ibu Hamil, Anak Sehat dan Cerdas
9	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kominfo Nomor B/000.1.2.3/37/II/2025 tanggal 26 Februari 2025	12 Maret 2025	Mamuju	Pelayanan sound system dalam rangka buka puasa bersama di SAPOTA
10	Surat Ketua Pengurus Kabupaten IGTKI PGRI Nomor 014/B.Org/P.Kab-IGTKI-PGRI/IV/202352 tanggal 23 April 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Mobil Sound system	3 Mei 2025	Mamuju	Pelayanan sound system pada acara Karnaval Mobil Hias Tingkat Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh IGTKI
11	Surat Sekretaris Dinas Dikpora Nomor 890/721/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Sound system	24 Mei 2025	Mamuju	Pelayanan sound system dalam rangka Launching 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SD Negeri 1 Mamuju
12	Surat Ketua Panitia Nomor 026/PM/PSSI/V/2025 Tanggal 15 Juni 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Sound system	18 Juni 2025	Mamuju	Pelayanan sound system di Stadion Manakarra dalam rangka penutupan Open Turnamen Sepak Bola Manakarra Cup 2 Tahun 2025
13	Surat Perintah Tugas PLT Kadis Kominfo Nomor B/800.1.11.1/93/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025	14 Agustus 2025	Mamuju	Latihan dan gladi pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-80 di Kantor Bupati Mamuju
14	Surat Perintah Tugas PLT Kadis Kominfo Nomor B/800.1.11.1/93/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025	15 Agustus 2025	Mamuju	Latihan dan gladi pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-80 di Kantor Bupati Mamuju
15	Surat Perintah Tugas PLT Kadis Kominfo Nomor B/800.1.11.1/93/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025	16 Agustus 2025	Mamuju	Latihan dan gladi pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-80 di Kantor Bupati Mamuju
16	Surat Perintah Tugas PLT Kadis Kominfo Nomor B/800.1.11.1/93/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025	17 Agustus 2025	Mamuju	Upacara pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Ke-80
17	Surat Perintah Tugas PLT Kadis Kominfo Nomor B/000.1.2.3/148/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025	15 sd 16 Oktober 2025	Sampaga	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam acara Lomba Desa Anti Korupsi di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga
18	Surat Bupati Mamuju Nomor 400.14.1.1/45/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Undangan Upacara Hari Sumpah Pemuda	27 Oktober 2025	Mamuju	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam rangka gladi dan upacara Sumpah Pemuda di Kantor Bupati Mamuju.
19	Surat Bupati Mamuju Nomor 400.14.1.1/45/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Undangan Upacara Hari Sumpah Pemuda	28 Oktober 2025	Mamuju	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam rangka gladi dan upacara Sumpah Pemuda di Kantor Bupati Mamuju.
20	Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Nomor 460/263/XI/2025/DINSOS tanggal 7 November 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Sound system	9 November 2025	Mamuju	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam rangka gladi upacara Tabur Bunga Hari Pahlawan di TMP Pattidi Kecamatan Simboro
21	Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Nomor 460/263/XI/2025/DINSOS tanggal 7 November 2025 Perihal Permohonan Peminjaman Sound system	10 November 2025	Mamuju	Diseminasi informasi melalui pelayanan sound system dalam rangka gladi dan upacara Tabur Bunga Hari Pahlawan di TMP Pattidi Kecamatan Simboro

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3. Terlaksananya kegiatan pembinaan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk 20 KIM di Kabupaten Mamuju;
4. Terlaksananya pendataan kembali Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Mamuju sejumlah 38 KIM.

Tabel 2.3
Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
Setelah Dilakukan Pendataan Kembali
Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Bala Balakang	Desa Bala Balakang	Juma Ali	Ketua KIM Bina Balbar
2	Kalukku	Kelurahan Bebanga	Kamaluddin	Ketua KIM Pemersatu
3	Kalukku	Desa Keang	Nehemia	Ketua KIM Keang
4	Kalukku	Desa Kabuloang	Dina Evayanti	Ketua KIM Desa Kabuloang
5	Mamuju	Desa Tadui	Musliadi	Ketua KIM Tikar
6	Mamuju	Desa Bambu	Rukman Rasyid	Ketua KIM Ds Bambu
7	Mamuju	Desa Karampuang	Sadri	Ketua KIM Desa Karampuang
8	Mamuju	Desa Karampuang	Fahri	Ketua Kim Liutang
9	Mamuju	Desa Karampuang	Fajri	Ketua Kim Gemapul
10	Mamuju	Desa Karampuang	Aan Riswanda	Ketua Kim Tanete
11	Mamuju	Kelurahan Binanga	Sukmawati, M	Ketua KIM Hikma Binanga
12	Mamuju	Kelurahan Binanga	Bau Te'ne	Ketua KIM Anggrek
13	Mamuju	Kelurahan Rimuku	Abd. Hafid	Kim Nurul Bakeri
14	Mamuju	Desa Batu Pannu	Sardi	Ketua KIM Batu Pannu
15	Mamuju	Desa Tadui	Amran	Ketua KIM Desa Tadui
16	Papalang	Desa Topore	Abd Rahman, SP	Ketua KIM Mandar Pitu
17	Papalang	Desa Bonda	Sulaeha, SP	Ketua KIM Sikasayangang
18	Papalang	Desa Papalang	Paharuddin	Ketua KIM Papalang
19	Sampaga	Desa Kalonding	Samsul Maarif	Ketua KIM Mamuju Mapaccing
20	Simboro	Desa Botteng	Zainal	Ketua KIM Desa Botteng
21	Simboro	Desa Botteng Utara	Amir	Ketua KIM Botteng Utara
22	Simboro	Saletto	Mujahiddin/ Warlia	Ketua KIM Mesakada Saletto
23	Simboro	Kelurahan Rangas	Udin Saqila	Ketua KIM Karebata

24	Simboro	Desa Sumare	Ramli	Ketua KIM Parundang
25	Tapalang	Desa Tampalang	Muh Alil K	Ketua KIM Desa Tampalang
26	Tapalang	Kelurahan Galung	Mauludin	Ketua KIM Pemuda Kreatif Tapalang
27	Tapalang	Kelurahan Kasambang	Hendri Dede Wahyudi	Ketua KIM Tonimana
28	Tapalang	Desa Taan	Muh Asran/Accank	Ketua KIM Balangan Latte
29	Tapalang	Desa Orobatu	Koesmayadi, SE	Ketua KIM Orobatu
30	Tapalang	Desa Kopeang	Karmin	Ketua KIM Maju Bersama
31	Tapalang	Desa takandeang	Mahyuddin	Ketua KIM Gerbang Desata
32	Tapalang	Kelurahan Dayanginna	Muh. Yamin Muin	Ketua KIM Harapan Baru
33	Tapalang Barat	Desa Pasa'bu	Muh Fahrunnisa	Ketua KIM Pammase Puang
34	Tapalang Barat	Desa Ahu	Udin, SPd	Ketua KIM Tabalida
35	Tapalang Barat	Desa Labuang rano	Hamsah Mansyur, Takwa	Ketua KIM Kusmenaf
36	Tapalang Barat	Desa Lebanl	Muh. Imran	Ketua KIM Sipammesa
37	Tommo	Desa Rante Mario	I Wayan Sukardiana	Ketua KIM Mamuju Mapaccing Rante Mario
38	Tommo	Desa Kakulasang	Emanuel Eko Pratomo, S.Th, S.Pdk	Ketua KIM Solid

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

5. Tersedianya data hasil diseminasi informasi kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk publikasi penanganan stunting di Kabupaten Mamuju

Tabel 2.4
Laporan Hasil Diseminasi Informasi Terkait Penanganan Stunting Di Kabupaten Mamuju Tahun 2025

1. SULBAR EXPRESS (sulbarexpress.fajar.co.id)

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA	LINK
1	17 september 2025	Pemkab Mamuju siapkan Dokumen Kontijensi Penanguulangan Kedaruratan Kesehatan	https://sulbarexpres.fajar.co.id/2025/09/17/pemkab-mamuju-siapkan-dokumen-kontijensi-penangulangan-kedaruratan-kesehatan/
2	19 september 2025	dukungan World Cleanup day Indonesia, Pemkab Mamuju Gelar Pembersihan di Area Publik	https://sulbarexpres.fajar.co.id/2025/09/19/dukung-world-cleanup-day-indonesia-pemkab-mamuju-gelar-pembersihan-di-area-publik/
3	24 september 2025	Ibu Rumah Tangga Rasakan Taki Asuh Stunting Hadirkan Orang Tua Kedua.	https://sulbarexpres.fajar.co.id/2025/09/24/ibu-rumah-tangga-rasakan-taki-asuh-stunting-hadirkan-orang-tua-kedua/
4	29 september 2025	Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju Resmi DiBuka.	https://sulbarexpres.fajar.co.id/2025/09/29/sekolah-rakyat-terintegrasi-72-mamuju-resmi-dibuka/

2. RADAR SULBAR (radarsulbar.fajar.co.id)

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA	LINK
1	19 september 2025	Dukung World Cleanup day Indonesia, Pemkab Mamuju Kembali Gelar Pembersihan di Area Publik	https://radarsulbars.fajar.co.id/2025/09/19/dukung-world-cleanup-day-indonesia-pemkab-mamuju-kembali-gelar-pembersihan-di-area-publik/
2	24 september 2025	widyawati Rasakan Taki Asuh Stunting Hadirkan Orang Tua Kedua	https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/09/24/widyawati-rasakan-taki-asuh-stunting-hadirkan-orang-tua-kedua/
3	29 september 2025	Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju Resmi DiBuka.	https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/09/29/sekolah-rakyat-terintegrasi-72-mamuju-resmi-dibuka/

3. KATINTING (katinting.com)

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA	LINK
1	02 September 2025	Taki Asuh Stunting Diupgrade, Kini Hadir dengan Layanan Terpadu dan Pasar Murah	https://katinting.com/?s=taki+asuh+Stunting+Diupgrade+kini+hadir+dengan+layanan+terpadu+dan+pasar+murah
2	03 september 2025	Tekan Stunting, Bupati Mamuju Sutinah Gelar Gerakan Taki Asuh, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Pasar Murah di Bebanga Kalukku	https://katinting.com/?s=tekan+stunting+bupati+mamuju+sutinah+gelar+gerakan+taki+asuh+pemeriksaan+kesehatan+gratis+dan+pasar+murah+di+bebanga+kalukku
3	17 september 2025	Antisipasi Wabah, Pemkab Mamuju Susun Dokumen Kontijensi Kedaruratan Kesehatan	https://katinting.com/?s=antisipasi+wabah+pemkab+mamuju+susun+dokumen+kontijensi+kedaruratan+kesehatan
4	18 september 2025	Perkuat Ketahanan Kesehatan, Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar Rancang Pedoman Penanggulangan Wabah Terpadu	https://katinting.com/?s=perkuat+ketahanan+kesehatan+pemkab+mamuju+dan+pemprov+sulbar+rancang+pedoman+penanggulangan+wabah+terpadu
5	19 september 2025	Dukung World Cleanup Day, Pemkab Mamuju Gelar Aksi Pembersihan Dijalan Arteri	https://katinting.com/?s=dukung+world+cleanup+day+pemkab+mamuju+gelar+aksi+pembersihan+dijalan+arteri
6	24 september 2025	Taki Asuh Stunting Mamuju: Bukan Hanya Bantuan Pangan, Tapi Juga Perhatian dan Motivasi	https://katinting.com/?s=taki+asuh+stunting+mamuju+bukan+hanya+bantuan+pangan+tapi+juga+perhatian+dan+motivasi
7	30 september 2025	Sekolah Rakyat Terintegritasi 72 Mamuju Resmi Di Buka di Kalukku	https://katinting.com/?s=sekolah+rakyat+terintegrasi+72+mamuju+resmi+dibuka+di+kalukku

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

- 6. Terlaksananya diseminasi informasi melalui pembuatan spanduk/baliho informasi hari besar Nasional dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Mamuju sebanyak 8 publikasi
- 7. Terpublikasinya kegiatan Kepala Daerah dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju sebanyak 261 kali selama Tahun 2025 melalui media sosial dan website Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

Tabel 2.5
Laporan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah
Melalui Media Sosial
dan Website Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Publikasi	Keterangan
1.	Januari	17	
2.	Februari	21	
3.	Maret	50	
4.	April	34	
5.	Mei	20	
6.	Juni	13	
7.	Juli	0	
8.	Agustus	39	
9.	September	16	
10	Oktober	17	
11.	November	12	
12.	Desember	22	
	Total	261	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

8. Terlaksananya kerjasama media online sebanyak 11 kali kerjasama menghasilkan 165 rilis berita selama satu tahun, dan media cetak sebanyak 4 kali kerjasama menghasilkan 4 rilis berita selama satu tahun, ditambah dengan pembuatan Video Kaleidoskop Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebanyak 1 kali.

Tabel 2.6
Jumlah Kerjasama Media Cetak dan Media Online
Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju Tahun 2025

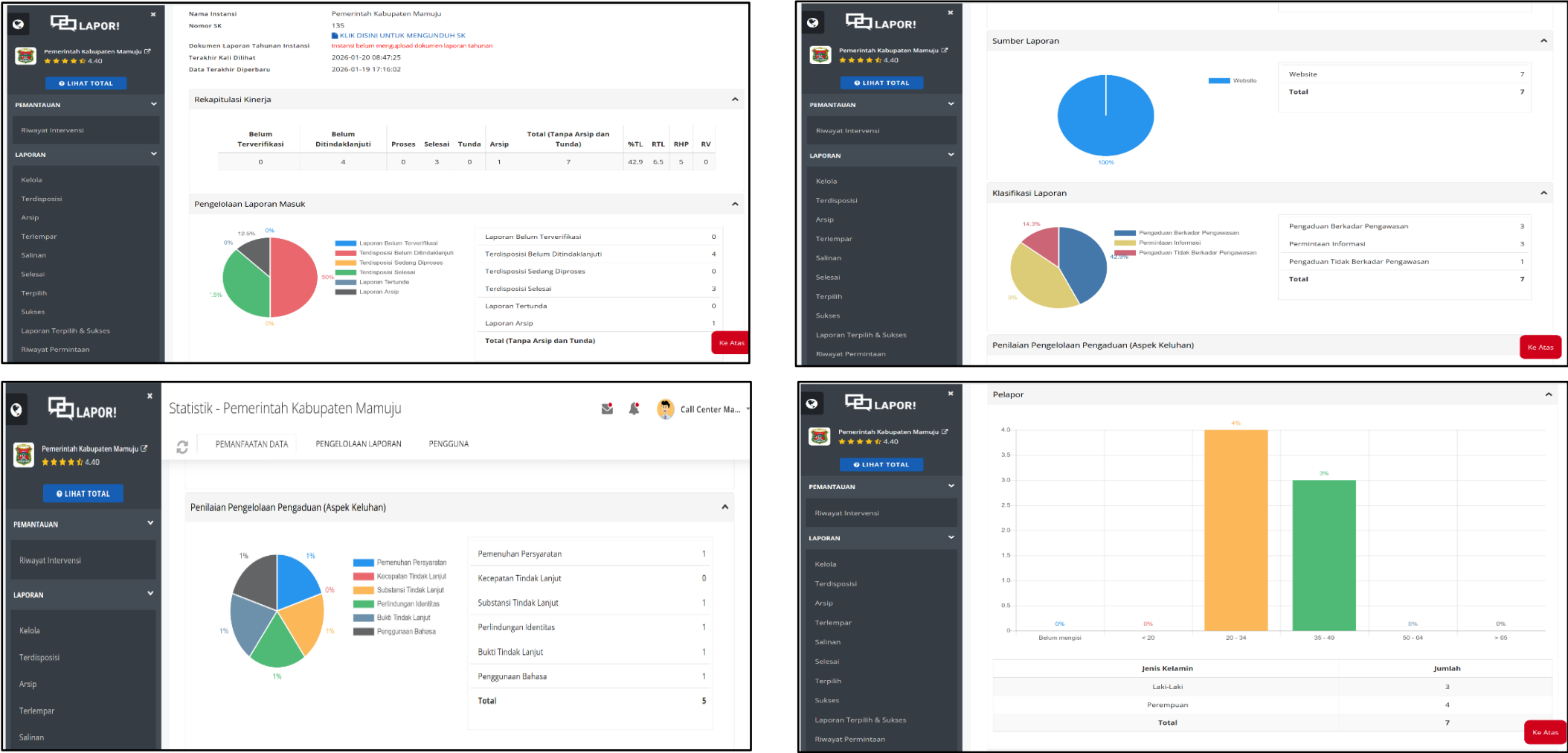
JENIS MEDIA	NO	KERJA SAMA	NAMA MEDIA	TANGGAL/ BULAN
MEDIA CETAK	1	Publikasi Media Cetak	Radar Sulbar	14 Januari
	2	Publikasi Media Cetak	Radar Sulbar	16 Januari
	3	Publikasi Media Cetak	Sulbar Express	14 Januari
	4	Publikasi Media Cetak	Sulbar Express	16 Januari
MEDIA ONLINE	1	Publikasi berita/advetorial	Katinting	Januari
	2	Publikasi berita/advetorial	Sulbar Express	Februari
	3	Publikasi berita/advetorial	Sulbar Express	April

	4	Publikasi berita/advetorial	Radar Sulbar	April
	5	Publikasi berita/advetorial	Katinting	April
	6	Publikasi berita/advetorial	Sulbar Express	Mei
	7	Publikasi berita/advetorial	Radar Sulbar	Mei
	8	Publikasi berita/advetorial	Katinting	Mei
	9	Publikasi berita/advetorial	Katinting	September
	10	Publikasi berita/advetorial	Radar Sulbar	September
	11	Publikasi berita/advetorial	Sulbar Express	September
Pembuatan Video	1	Video Kaleidoskop	Setara Kreatif	mber s/d Dese

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

9. Pengelolaan layanan aduan masyarakat melalui LAPOR-SP4N sebanyak 7 aduan selama Tahun 2025, yang mana aduan tersebut telah terdistribusikan ke Perangkat Daerah (PD) yang menangani secara teknis.
- Beberapa Gambar mengenai kondisi aduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR-SP4N, sebagai berikut :

Gambar 2.2
Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR-SP4N
Tahun 2025



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

b. Sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

Tabel 2.7
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50%	52,6%

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Pada Sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran dengan indikator kinerja Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi empat domain yaitu kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya fasilitasi Zoom Meeting Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) serta Perangkat Daerah sebanyak 113 Kegiatan selama setahun.

Tabel 2.8
Laporan Rekapitulasi Fasilitas ZoomMeeting
Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Januari	8	
2.	Februari	6	
3.	Maret	5	
4.	April	11	
5.	Mei	8	
6.	Juni	8	
7.	Juli	10	
8.	Agustus	11	
9.	September	11	
10.	Oktober	13	
11.	November	12	
12.	Desember	10	
	Total	113	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

2. Tersedianya data wilayah Kabupaten Mamuju berdasarkan nama Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan nya dengan persentase 21,21 % yang masih dalam kategori BlankSpot.

Tabel 2.9
Data BlankSpot Wilayah Kabupaten Mamuju
Tahun 2025

LAPORAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU MELALUI DISKOMINFOSIP TENTANG
BLANKSPOT DI KABUPATEN MAMUJU

A. Tabel Persentase Data Blank Spot Desa/ Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Persentase Blank Spot Area	Total Persentase/ Kecamatan
1	BONEHAU	Banuada	100,00%	18,78%
		Bonehau	10,00%	
		Buttuada	11,00%	
		Hinua	9,00%	
		Kinatang	8,00%	
		Lumika	14,00%	
		Salutiwo	5,00%	
		Mappu	6,00%	
		Tamalea	6,00%	
2	KALUKKU	Belang Belang	0,00%	7,60%
		Beru-Beru	0,00%	
		Guliling	0,00%	
		Kabuloang	0,00%	
		Kalukku	0,00%	
		Kalukku Barat	0,00%	
		Keang	0,00%	
		Pammulukang	0,00%	
		Pokkang	0,00%	
		Sondoang	25,00%	
		Uhaimate	39,09%	
		Sinyonyoi	0,00%	
		Bebanga	20,00%	
		Sinyonyoi Selatan	22,33%	

3	KALUIMPANG	Batu Makkada	100,00%	78,88%
		Kalumpang	16,45%	
		Karama	100,00%	
		Karataun	5,00%	
		Kondo Bulu	4,00%	
		Lasa'	100,00%	
		Limbong	100,00%	
		Makkaliki	100,00%	
		Polio	100,00%	
		Salumakki	100,00%	
		Sandapang	100,00%	
		Siraun	100,00%	
		Tumoga	100,00%	
4	KEPULAUAN	Bala Balakang	100,00%	100,00%
		Bala-Balakang Timur	100,00%	
5	MAMUJU	Bambu	0,00%	0,00%
		Batu Pannu	0,00%	
		Karampuang	0,00%	
		Tadui	0,00%	
		Binanga	0,00%	
		Karema	0,00%	
		Mamunyu	0,00%	
		Rimuku	0,00%	
6	PAPALANG	Batu Ampa	5,13%	2,70%
		Boda-Boda	4,00%	
		Bonda	0,00%	
		Papalang	0,00%	
		Salukayu	0,00%	
		Sisango	3,00%	
		Sukadamai	0,00%	
		Toabo	0,00%	
		Topore	0,00%	
7	SAMPAGA	Bunde	0,00%	10,00%
		Kalonding	4,00%	
		Losso	16,00%	
		Salubarana	0,00%	
		Sampaga	0,00%	
		Tanambuah	15,00%	
		Tarailu	0,00%	
8	TOMMO	Leling Utara	8,00%	4,04%
		Leling Barat	10,00%	
		Buana Sakti	0,00%	
		Campaloga	0,63%	
		Kakullasang	0,00%	
		Kalepu	0,00%	
		Leling	13,87%	
		Tamemongga	14,00%	
		Sandana	0,00%	
		Tamejarra	0,00%	
		Tommo	0,00%	
		Malino	0,00%	
		Saludengen	10,00%	
		Rantemario	0,00%	
9	SIMBORO	Botteng Utara	0,00%	0,56%
		Botteng	0,00%	
		Tapandullu	3,00%	
		Sumare	2,00%	
		Simboro	0,00%	
		Saletto	0,00%	
		Rangas	0,00%	
		Pati'Di	0,00%	
10	TAPALANG	Bela	100,00%	25,00%
		Kopeang	100,00%	
		Orobatu	0,00%	
		Rantedoda	0,00%	
		Taan	15,00%	
		Takandeang	9,00%	
		Tampalang	10,00%	
		Kasambang	0,00%	
		Galung	0,00%	
		Dayanginna	0,00%	

11	TAPALANG BARAT	Dungkait	40,00%	21,17%
		Ahu	0,16%	
		Labuang Rano	5,00%	
		Lebani	50,00%	
		Pangasaan	0,00%	
		Pasabu	3,00%	
		Tanete Pao	50,00%	
12	Total Persentase Blank Spot	101		21,21%

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3. Tersedianya data usulan bantuan internet untuk titik BlankSpot pada fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di 10 Kecamatan, yaitu 89 Titik untuk Fasilitas Pendidikan (SD/Sederajat dan SMP/Sederajat) dan Fasilitas Kesehatan 6 Titik.

Tabel 2.10
Usulan Titik Blank Spot Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No.	Kecamatan/ Desa	Titik Lokasi Blank Spot	Layanan Pendidikan (SD/SMP)	Layanan Kesehatan (Puskesmas/R umah Sakit) *
1	Kecamatan Kepulauan Balabalakang			
2	Balabalakang Timur	-2.5387, 117.943	SD INPRES PULAU AMBO	
3	Balabalakang Timur	-2.4223 117.5935	SD NEGERI KECIL PULAU LABIA	
4	Balabalakang Timur	-2.4527, 117.654	SDN KECIL PULAU SELOANG	
5	Balabalakang Timur	-2,452, 117,6533	SMPN 1 P. Bala-Balakang	
6	Blalabalakang	-2.4593, 117.3755	SD NEGERI KECIL PULAU POPOONGAN	
7	Blalabalakang	-2.2205, 117.4142	SD NEGERI KECIL PULAU SABAKKATAN	
8	Blalabalakang	-2.7128157, 119.8176668	SDK. PULAU SAMATAHA	
9	Blalabalakang	-2.6846,118.8924	SD NEGERI KECIL PULAU SALISSINGAN	
10	Blalabalakang	-2.3646 ,119.4711	SDK. PULAU SABOEANG	
11	Blalabalakang	-2.7128157, 119.8176668	SDK. PULAU SAMATAHA	
12	Blalabalakang	-2.450, 117.983		PUSKESMAS SALISSINGAN
13	Kecamatan Sampaga			
14	TAMEMONGGA	-2.3115, 119.2102	SD INPRES KALEPU	
15	SALUDENGEN	-2.2359, 119.4103	SD NEGERI SALUDENGEN	
16	Kecamatan Bonehau			
17	LUMIKA	-2.4869, 119.367	SD INPRES LUMIKA I	

18	LUMIKA	-2.4722, 119.3772	SD NEGERI LUMIKA II	
19	LUMIKA	-2.5319, 119.3278	SDN KALABUAN	
20	MAPPU.	-2.4786, 119.3837	SD INPRES MAPPU	
21	BONEHAU	-2.5019, 119.3465	SD INPRES PABETTENGAN	
22	BONEHAU	-2.5048, 119.3472	SMP NEGERI 1 BONEHAU	
23	BONEHAU	-2.5355, 119.316	SD NEGERI TALONDO KONDO	
24	BONEHAU	-2.655830313509374, 119.19978376160552		PUSKESMAS BONEHAU
25	Buttuada	-2.662, 119.1955	SD INPRES KALLAN BARU	
26	Buttuada	-2.6482, 119.2361	SDN MAO	
27	Buttuada	-2.6384, 119.2179	SDN PARAKDANG	
28	Buttuada	-2.654458496820536, 119.19875379339516		PUSKESMAS BUTTUADA
29	Salutiwo	-2.5293, 119.3499	SD INPRES SALUTIWO I	
30	Salutiwo	-2.5307, 119.3418	SD INPRES SALUTIWO II	
31	Tamalea	-2.4812, 119.3356	SD INPRES TALONDOK	
32	HINUA	-2.5998, 119.6457	SD NEGERI HINUA	
33	HINUA	-2.5790062556226867 , 119.26913495443695		PUSKESMAS HINUA
34	Kinantang	-2.411, 119.5401	SD NEGERI KINATANG	
35	Kinantang	-2.6582 , 119.4907	SDN PELOKOAN	
36	Buttuada	-2.6202, 119.2339	SD NEGERI PELOSIAN	
37	Buttuada	-2.609, 119.2533	SD NEGERI SALUENO	
38	Tamalea	-2.5457, 119.3011	SD NEGERI TAMALEA	
39	Kecamatan Kalumpang.			
40	Kalumpang	-2.4778, 119.4839	SD NEGERI KALUMPANG	
41	MAKKALIKI	-2.5083, 119.5583	SD NEGERI MARIRI	
42	MAKKALIKI	-2.5128, 119.5832	SDN MAKKALIKI	
43	Mappu	-2.4569 119.403	SDN SARURAN	
44	SANDAPANG	2.3317, 119.569	SDN SANDAPANG	
45	SANDAPANG	-2.3363, 119.5908	SD NEGERI PANASUAN	
46	SANDAPANG	-2.340426, 119.592861	SDN KAHALEANG	
47	LASA	-2.6437 119.6166	SDN Lasa	
48	BATU MAKKADA	-2.4295052, 119.6869413	SMPN 9 KALUMPANG	
49	BATU MAKKADA	-2.4004, 119.6829	SD NEGERI BOSOKAN	
50	BATU MAKKADA	-2.3966 119.6787	SDN B a u	
51	Limbong	-2,4495, 119.5614	SMPN 8 KALUMPANG	

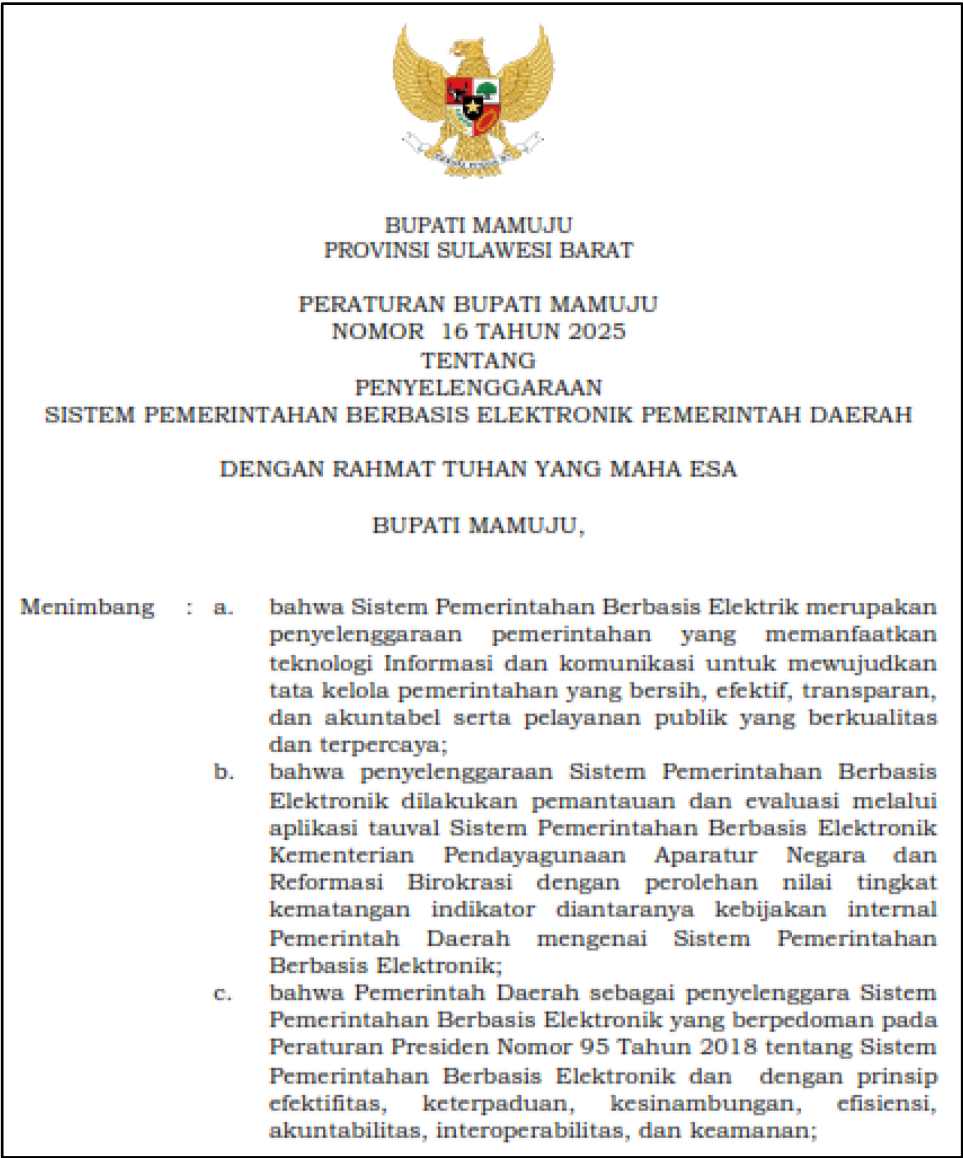
52	Limbong	-2.4462, 119.569	SD NEGERI RATTEMENANGA	
53	Limbong	-2.4229, 119.5526	SDN Maliuko	
54	Siraun	-2.6062, 119.6267	SMP NEGERI 6 KALUMPANG	
55	Siraun	-2.5083, 119.5583	SD NEGERI MAPO	
56	Siraun	-2.4054284, 119.6108271	SD NEGERI PATTUNG	
57	Siraun	-2.5742, 119.6284	SD NEGERI PEKKARO	
58	Polio	-2,4181, 119.6039	SMP NEGERI 7 KALUMPANG	
59	Polio	-2.394, 119.6471	SD NEGERI RANTEPATA	
60	Karataun	-2.5391, 119.5211	SMPN 3 Kalumpang	
61	Karataun	-2.533, 119.5163	SD INPRES BATUISI	
62	Karataun	-2.5385, 119.5227	SD NEGERI BUALLO	
63	Karataun	-2.5919, 119.5692	SD NEGERI MALOLO	
64	Tumonga	-2.4188, 119.6043	SMP NEGERI 5 Kalumpang	
65	Tumonga	-2.4186, 119.605	SD INPRES TARARANG	
66	Salumakki	-2.5647, 119.6572	SMPN 4 KALUMPANG	
67	Salumakki	-2.5645, 119.6551	SD INPRES SALU	
68	Karama	-2.3742, 119.6195	SMP NEGERI 2 KALUMPANG	
69	Karama	-2.3753, 119.6157	SD INPRES TAMAN	
70	Karama	-2.3902, 119.6583	SD NEGERI PATUDAAN	
71	Kalumpang	-2,4802, 119,4862	SMP NEGERI 1 KALUMPANG	
72	Kondo Bulu	-2.5481, 119.4862	SD INPRES BULO	
73	Kondo Bulu	-2.5348, 119.4704	SD INPRES SUMUA	
74	Kecamatan Sampaga			
75	Salubarana	-2.320873, 119.155444	SMP S SALUKAYU IV	
76	Losso	-2.3190042, 119.1993337	SD INPRES LOSSO	
77	Kecamatan Papalang			
78	Boda Boda	-2.3927, 119.19	SD NEGERI BODA-BODA	
79	Kecamatan Kalukku			
80	Bebanga	-2.6529878, 119.0453015	SD NEGERI SAMAK	
81	Sondoang	-2.5818, 119.1324	SMP NEGERI 4 KALUKKU	
82	Sondoang	-2.5818, 119.1324	SD NEGERI RANTEDANGO	
83	Sondoang	-2.5764 119.1125	SD NEGERI PANAQ	
84	Sondoang	-2.563, 119.088	SD INPRES SALUKAHA	
85	Keang	-2,647, 119.155	SMP NEGERI 5 KALUKKU	
86	Pamulukkang	-2,6247, 119.0745	SMPN 7 KALUKKU	

87	Kecamatan Tapalang Barat			
88	Labuang Rano	-2.7875, 118.781	SMPN 3 Tapalang Barat	
89	Labuang Rano	-2.7733, 118.78	SD NEGERI TAPANGKANG TIMUR	
90	PANGASAAN	-2.7601, 118.8058	SMPN 4 Tapalang Barat	
91	Pasabu	-2.8061, 118.7666	SMP NEGERI 1 TAPALANG BARAT	
92	Dungkait	-2.853225479634648, 118.77401888208858		PUSKESMAS DUNGKAIT
93	Kecamatan Tapalang			
94	KOPEANG	-2.8503, 118.9	SMPN 4 TAPALANG	
95	KOPEANG	-2.8916, 118.9775	SD INPRES BELA	
96	KOPEANG	-2.8374, 118.9319	SD Negeri Rante Mario	
97	Bela	-2.829, 119.0171	SD NEGERI SALUMAYANG	
98	Bela	-2.8664, 118.9853	SD NEGERI SANDAUHAI	
99	Kecamatan Tommo			
100	LELING UTARA	-2.1729, 119.4613	SMPN 5 Tommo	
101	Leling	-2.2422, 119.425	SMPN 6 Tommo	
102	Leling	-2.2322262442208496 , 119.39500982248072		PUSKESMAS LELING
103	Sandana	-2,2338, 119.3847	SMPN 7 Tommo	
104	Tammejarra	-2.2899, 119.3019	SD INPRES TOMMO IV	
105	Tamemongga	-2.3151, 119.2423	SMPN 8 Tommo	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

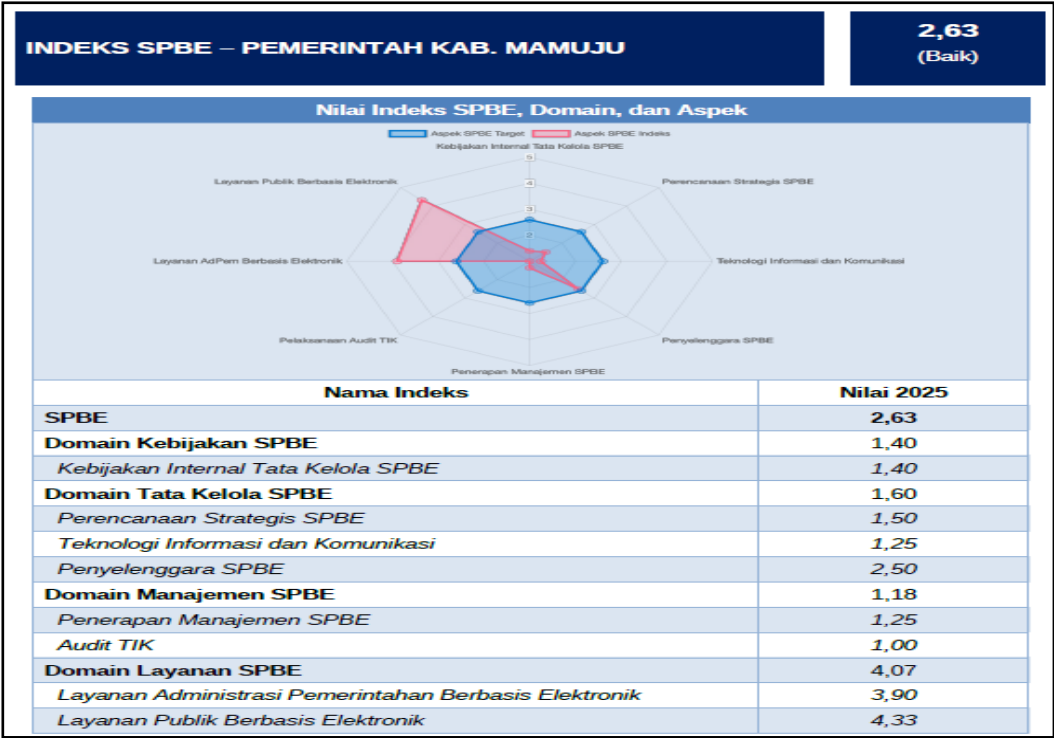
4. Terlaksananya Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah mendapatkan hasil dengan nilai 2,63 (Baik) dan sekaligus pengumpulan data terkait penggunaan instrumen 47 indikator dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
5. Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan server, website Pemerintah Kabupaten Mamuju serta aplikasi-aplikasi Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.
6. Tersedianya Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah.

Gambar 2.3
Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah



Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025

Gambar 2.4
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025



Sumber Data : KemenPAN-RB, 2025

- c. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Tabel 2.11
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

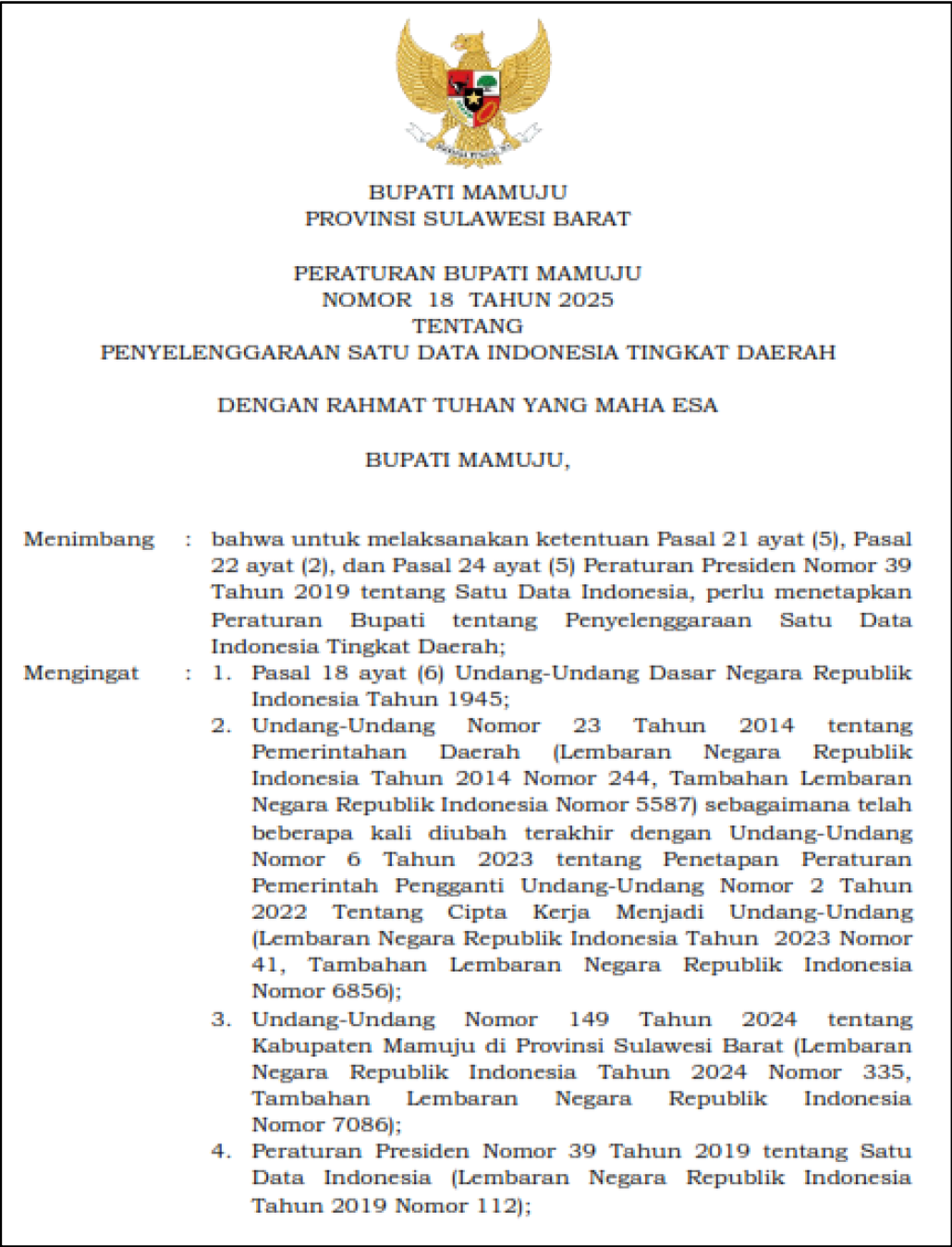
Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Indeks IPS	1,94	1,94

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) bertujuan meningkatkan kualitas data statistik sektoral dengan rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Tersedianya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah.

Gambar 2.5
Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah



Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025

2. Terlaksananya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Mamuju yaitu Pembinaan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;
3. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2025 ini tidak dapat

dilaksanakan dikarenakan perubahan proses bisnis EPSS di tingkat pusat, akan tetapi tahapan pelaksanaan evaluasi tersebut tetap dilaksanakan untuk mempersiapkan EPSS tahun depan yaitu dengan Penunjukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju sebagai Perangkat Daerah dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Tahun 2025, sesuai dengan SK Bupati Mamuju Nomor 277 Tahun 2025 dan Pengelolaan e-Walidata pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

Gambar 2.6
Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 27 Tahun 2025
Tentang
Penunjukan Perangkat Daerah Dalam Penilaian Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 277 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENILAIAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
TAHUN 2025

BUPATI MAMUJU,

Menimbang: a. bahwa untuk peningkatan Indeks Pembangunan Statistik di daerah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) perlu menunjuk Perangkat Daerah dalam penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025

Gambar 2.7
Pembinaan Statistik Sektoral
Oleh Pembina Data Kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

d. Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah

Tabel 2.12
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	67 %	92,99 %

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu

1. Terlaksananya aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) sampai dengan Tahun 2025 sudah terealisasi sebanyak 337 ASN yang telah memiliki dan memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersebut;

Tabel 2.13
Data Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat :Jl.K.S Tubun No.33,Mamuju 91511 Email: diskominfosandi@mamujukab.go.id

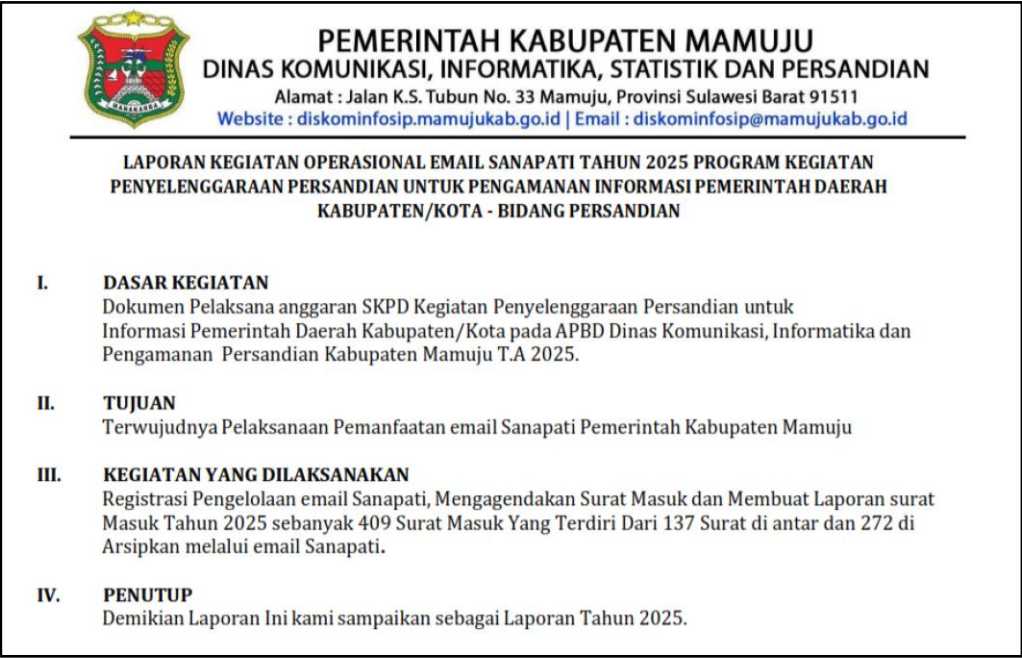
DATA AKTIVASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) TAHUN 2025
YANG DILAKSANAKAN BIDANG PERSANDIAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN YANG SUDAH MELAKUKAN AKTIVASI	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	4	
2	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	14	
3	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	5	
4	DINAS PERHUBUNGAN	3	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	33	
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	3	
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	30	
9	DINAS PERDAGANGAN	6	
10	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN	4	
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	34	
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	
15	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	10	
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	3	
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	
18	DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2	
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIAHAN (BKPP)	3	
20	BADAN KESBANGPOL	10	
21	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4	
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	4	
23	DINAS KESEHATAN	4	
24	INSPEKTORAT	4	
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	5	
26	SEKRETARIAT DPRD	1	
27	DINAS SOSIAL	4	
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	22	
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	6	
30	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	18	
31	DINAS PERKEBUNAN	17	
32	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	4	
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	8	
34	KECAMATAN MAMUJU	19	
35	KECAMATAN SIMBORO	4	
36	KECAMATAN TAPALANG	0	
37	KECAMATAN TAPALANG BARAT	0	
38	KECAMATAN KALUKKU	6	
39	KECAMATAN PAPALANG	2	
40	KECAMATAN SAMPAGA	2	
41	KECAMATAN TOMMO	12	
42	KECAMATAN BONEHAU	3	
43	KECAMATAN KALUMPANG	0	
44	KECAMATAN BALA-BALAKANG	0	
45	PUSKESMAS RANGAS	42	
J U M L A H		337	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

2. Terlaksananya pengelolaan Email Sanapati dimana Email Sanapati ini merupakan e-mail khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks sehingga mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Realisasi surat yang masuk melalui email sanapati 409 kali penerimaan dan pengantaran selama Tahun 2025 sebanyak 137 kali.

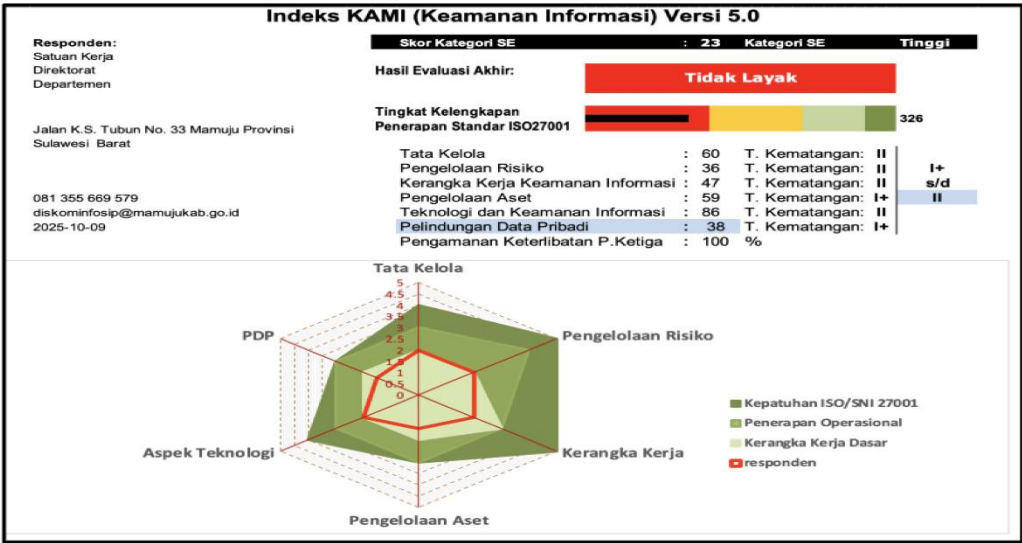
Gambar 2.8
Laporan Kegiatan Pengelolaan Email SANAPATI
Tahun 2025



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3. Terlaksananya Laporan Assesment Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) versi 5.0 Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia pada Tahun 2025, berdasarkan kelengkapan penerapan standar SNI/ISO 27001 sesuai kategori pada **skor 326**, dengn hasil evaluasi akhir masih berada pada level **Tidak Layak**.

Gambar 2.9
Laporan Assessment Indeks Keamanan Informas (IKAMI) Versi 5.0
Pemerintah Kabupaten Mamuju
Tahun 2025



Sumber Data : BSSN-RI, 2025

4. Tersedianya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 360 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Mamuju

Gambar 2.10
Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 360 Tahun 2025
Tentang
Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS)
Kabupaten Mamuju

	 BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU NOMOR 360 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN MAMUJU- (TTIS) BUPATI MAMUJU,
Menimbang	: a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman; b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian; c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pada Pemerintah Daerah, Bupati melakukan percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber dan registrasi Tim Tanggap Insiden Kabupaten Tahun -TTIS 2025 untuk memberikan respons cepat dan terukur terhadap ancaman siber; d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan—sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk Tim Tanggap Insiden Siber; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju -TTIS.

Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025

e. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.14
Analisis Hasil Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB	BB

Sumber Data : *DISKOMINFOSIP, 2025*

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tepat waktu;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana ASN lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menunjang pelaksanaan tugas;

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
TABEL T-C.30.

NO	INDIKATOR (tujuan/sasaran strategis)	SPM / STANDAR NASIONAL (permendagri 59/2020)	IKK (sesuaikan dengan permendagri 18 dan 86)	SATUAN	TARGET KINERJA						REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		Catatan Analisis
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	
	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)		RENSTRA	Nilai	2.50	2.75	2.80	2.85	2.90	3.00	2.63	-	100	100	Skor Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun Berjalan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika															
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		IKK PERMENDAGRI 86	KIM											$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		IKK PERMENDAGRI 86												$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		IKK PERMENDAGRI 86	Persen											$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		IKK PERMENDAGRI 86												$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		IKK PERMENDAGRI 86												$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
6	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik		IKU & IKD RENSTRA	Persen	65	70	75	80	85	90	100	-	100	100	Persentase Keterbukaan Informasi = $\frac{\text{Jumlah Indikator / Standar KIP Yang Terpenuhi}}{\text{Total Indikator / Standar KIP Yang Harus Dipenuhi}} \times 100 \%$
7	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi		IKU & IKD RENSTRA	Persen	50	60	70	80	90	100	50	-	100	100	Persentase Layanan Online Terintegrasi = $\frac{\text{Jumlah Layanan Publik Diskominfo yang Online dan Terintegrasi}}{\text{Total Layanan Publik Diskominfo Wajib/Potensial Untuk Didigitalisasi}} \times 100 \%$

NO	INDIKATOR (tujuan/sasaran strategis)	SPM / STANDAR NASIONAL (permendagri 59/2020)	IKK (sesuaikan dengan permendagri 18 dan 86)	SATUAN	TARGET KINERJA						REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		Catatan Analisis
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik															
8	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		IKK PERMENDAGRI 86		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada/ Tidak
9	Buku "kabupaten dalam angka"		IKK PERMENDAGRI 86		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada/ Tidak
10	Buku "PDRB"		IKK PERMENDAGRI 86		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada/ Tidak
11	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		IKU & IKD RENSTRA	Nilai	1.94	2.00	2.15	2.25	2.45	2.75	-	-	100	100	Skor Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sentoral (EPSS) pada Tahun Berjalan
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian															
12	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		IKK PERMENDAGRI 86	Persen											$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100$
13	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		IKU & IKD RENSTRA	Persen	50	60	70	80	90	100	93	-	100	100	Persentase Penyelenggaraan Persandian = $\frac{\text{Jumlah Program/Sistem Keamanan Yang Sudah Terlaksana}}{\text{Total Target Yang Ditetapkan}} \times 100\%$
Unsur Perencanaan															
14	Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah		IKU & IKD RENSTRA	Predikat	BB	BB	A	A	AA	AA	BB	-	100	100	Skor Hasil Evaluasi AKIP

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023 – 2025

- TIDAK ADA -

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD 2027, dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Kondisi Dinamis

a. Rumusan Masalah DISKOMINFOSIP Tahun 2027

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain:

1. *Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah*

Perubahan lingkup strategis yang sangat dinamis, yang ditadai dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, meningkatnya tuntutan masyarakat terkait transparansi publik yang lebih mudah dan cepat sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja yang terkait dengan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi.

Hal kritis yang perlu mendapatkan perhatian pada Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yaitu secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tatakelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerepan SPBE Pemerintah Kabupaten Mamuju. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Mamuju, sudah mendapatkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa kelemahan.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Mamuju masih memiliki beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola Arsitektur SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK. Kebijakan SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Manajmen SPBE, Teknologi Informasi dan komunikasi dan audit internal belum memiliki landasan dalam pelaksanaannya dari kebijakan internal dan tata kelola yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan aspek tersebut.

Pengaturan terkait kebijakan SPBE perlu untuk segera dibuat untuk menjadi acuan baku dalam penyelenggaraan SPBE dalam bentuk kebijakan internal (Peraturan Bupati/Pedoman Pelaksanaan SPBE).

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang akan mempengaruhi kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

- 1. Masih belum maksimal pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Mamuju, yang dapat dilihat dari nilai Indeks SPBE yang cenderung sulit naik;
- 2. Masih belum maksimalnya keamanan informasi pada jaringan online Pemerintah Kabupaten Mamuju dimana nilai Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) yang belum dilakukan penilaian;
- 3. Masih perlunya dilakukan peningkatan jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK dan terbatasnya jumlah SDM TIK di Dinas Kominfo karena proses mutasi pegawai.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, memberikan dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan capaian Program Nasional.

- a. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Tujuan dan sasaran strategis kinerja pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tersebut di atas berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025– 2029, yaitu pada pencapaian :

Visi	:	MAMUJU KEREN		
Misi Kesatu	:	Menyelenggarakan	Tata	Kelola
		Pemerintahan Yang Baik		
Tujuan	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional		

Sasaran	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik
Indikator	: Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Sasaran	
Strategi	: 1. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan melalui e-office,e-surat dan de-arsip untuk efesiensi birokrasi 3. Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Transformasi Digital Pemerintahan Kabupaten Mamuju 4. Penyusunan Regulasi Daerah Terkait Perlindungan Data dan Keamanan Informasi Digital 5. Pembangunan Ekosistem Sistem Informasi terpadu antar-OPD untuk Memperkuat Sinergi dan Efesiensi Layanan
Arah Kebijakan	: 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Penguatan Pengawasan Pemerintah serta Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

b. Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang terkait dan berdampak terhadap pencapaian program nasional antara lain :

1. Program Komunikasi dan Informasi Publik
2. Program Aplikasi Informasi
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Persandian

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju juga mengalami beberapa tantangan yang harus dilalui untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga terdapat beberapa peluang yang bisa dijadikan pendukung dalam mencapai target kinerja.

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju :

1. Belum optimalnya kebijakan daerah dalam pedoman penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, dan persandian.
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, dan persandian.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, dan persandian.
4. Masih minimnya infrastruktur penunjang pelaksanaan *e-Government*.
5. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan.
6. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.
7. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi.
8. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
9. Kesenjangan informasi di masyarakat, sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Keamanan informasi yang diperlukan Pemkab Mamuju seiring perkembangan IT.
11. Masih rendahnya tingkat kesadaran kemananan informasi di lingkup ASN dan masyarakat.

12. Perkembangan teknologi informasi yang berimbas akan tuntutan keamanan informasi sesuai dengan ancaman yang meningkat baik ragam ancaman keamanan informasi yang berkembang maupun intensitasnya.

b. Peluang

1. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya informasi.
5. Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggara-raan pemerintahan.
7. Kebutuhan keamanan informasi disetiap lini sesuai standar.
8. Kebutuhan akan penyajian data statistik secara digital dan kemudahan akses dengan sarana mobile.
9. Dukungan anggaran dana dari pemerintah.

b. Isu Strategis DISKOMINFOSIP Tahun 2027

1. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 adalah :

- a. Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
- b. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat;
- c. Penguatan data center yang menjadi pusat data pemerintah Kabupaten Mamuju;
- d. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Mamuju;

- e. Peningkatan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Mamuju;
- f. Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan satu data yang terintegrasi dan berbagi pakai;
- g. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal; dan
- h. Pengembangan sumber daya aparatur dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang menguasai teknologi informasi.

c. Evaluasi Hasil RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang disahkan melalui Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar. Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian telah melakukan 5 Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.667.347.397,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.359.615.111,- atau sebesar 91,61 %. Pada Tahun Anggaran 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 3.388.369.160,-.

1. Realisasi Program/ Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) bertujuan meningkatkan kualitas data statistik sektoral untuk mendukung Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2025 ini tidak dapat dilaksanakan karena perubahan proses bisnis EPSS di tingkat pusat akibat dari adanya efisiensi anggaran.

2. Realisasi Program/ Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju melaksanakan 2 (dua) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini dimaksudkan untuk pengelolaan informasi dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mamuju, yaitu melalui Relasi Media, Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Pelayanan Informasi Publik, Diseminasi Informasi, Penyusunan Konten realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik dengan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat.

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

1.1.1 Relasi Media

Pada Sub Kegiatan Relasi Media dengan indikator Jumlah Aktivitas relasi media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers. 2. terdaftar di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 3. aktif dalam kegiatan relasi media, dengan target 12 Laporan, terealisasi 12 laporan atau 100 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 99,92 persen.

1.1.2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dengan indikator Jumlah Komunitas Informasi

Pada Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dengan indikator Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan target 60 Komunitas, terealisasi 58 komunitas atau 96,66 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 86,19 persen.

1.1.3 Pelayanan Informasi Publik

Pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik, dengan indikator Jumlah Permohonan Informasi Publik selama Tahun 2025 yaitu sebanyak 7 Pemohon.

1.1.4 Diseminasi Informasi

Pada sub kegiatan Diseminasi Informasi dengan indikator persentase khalayak yang terpapar informasi publik selama Tahun 2025 sebanyak 21 Kali dengan kinerja keuangannya mencapai 82,97 persen.

1.1.5 Penyusunan Konten

Pada sub kegiatan Penyusunan Konten dengan indikator Jumlah Konten Informasi Publik dengan target 140 Konten, terealisasi 261 konten atau 186 persen, sangat jauh melebihi target dengan kinerja keuangannya mencapai 98,94 persen.

2. Program Aplikasi Informatika

2.1 Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

2.1.1 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

Pada sub kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan indikator dengan target 12 laporan, terealisasi 12 laporan atau 100 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 99,59 persen.

2.1.2 Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan dengan target 2 Dokumen, realisasi kinerja 100 persen dan kinerja keuangannya mencapai 99,86 persen.

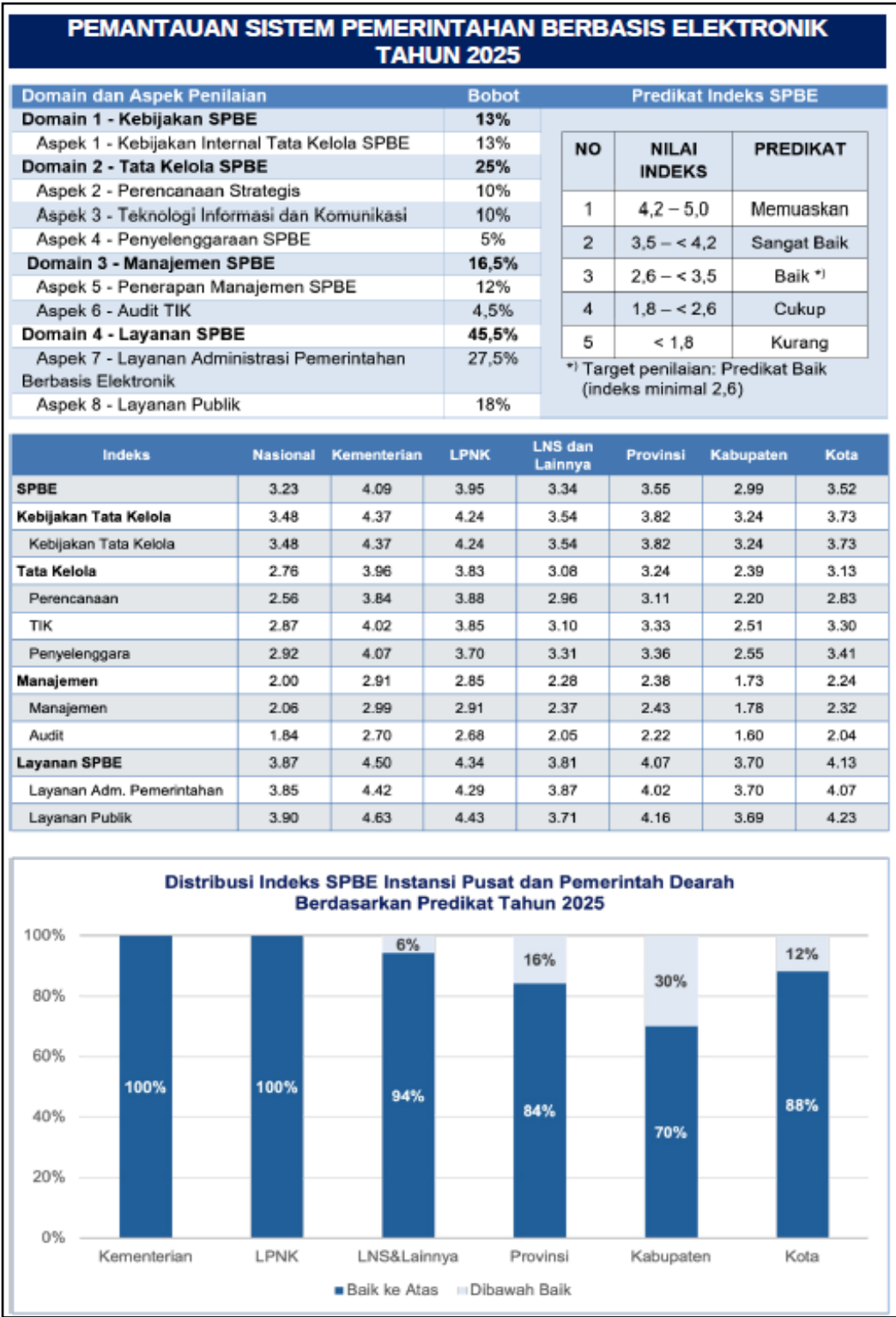
2.1.3 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan target 12 Laporan, terealisasi 12 laporan atau 100 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 99,92 persen.

2.1.4 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

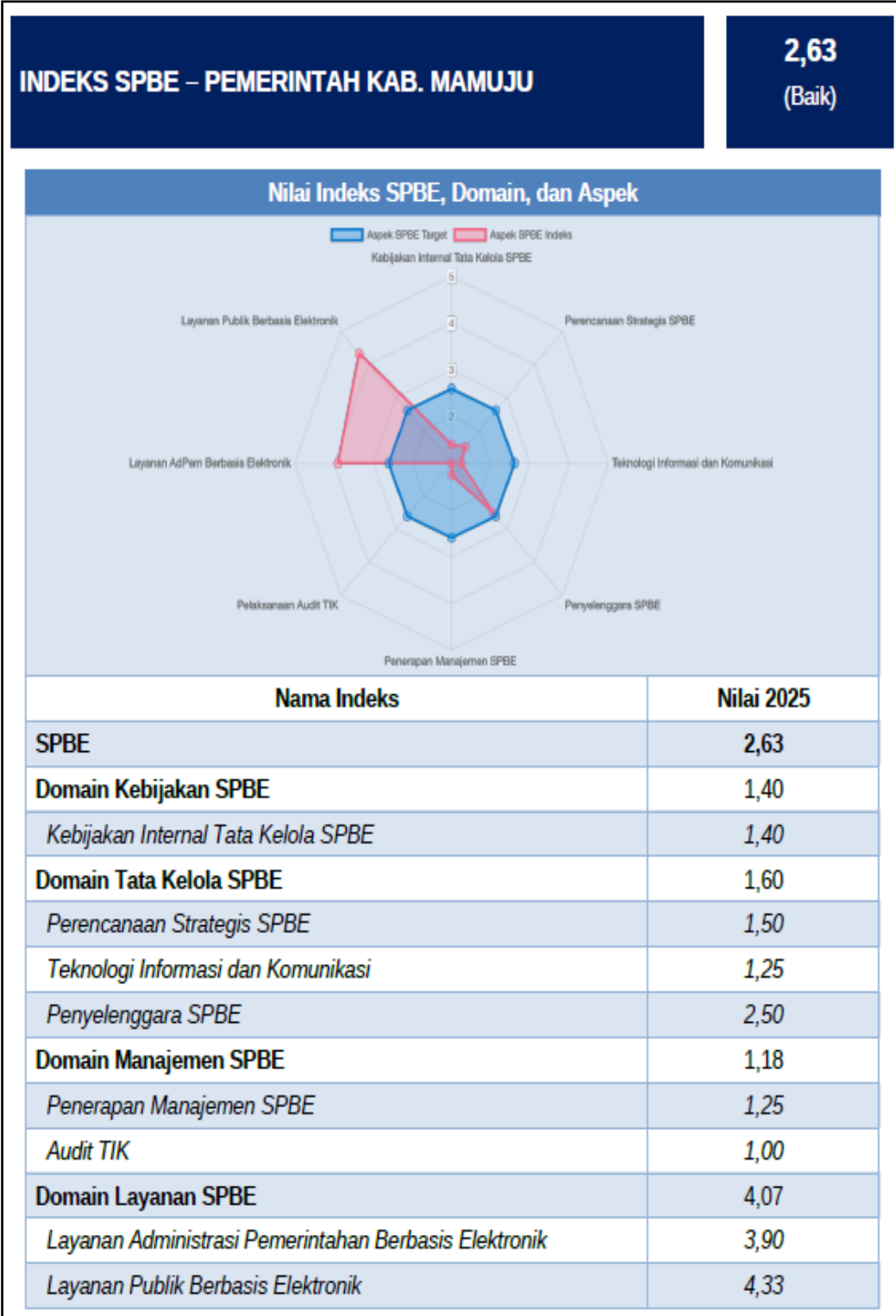
Pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas dengan indikator Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas dengan target 12 laporan, terealisasi 12 laporan atau 100 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 97,66 persen. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari table di bawah ini :

Gambar 2.11
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tahun 2025



Sumber Data : Kementerian PAN-RB, 2025

Gambar 2.12
Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025



Sumber Data : Kementerian PAN-RB, 2025

b. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan Data Statistik Sektoral. Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan (100 persen) dengan capaian sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

1.1.1 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor

Pada sub kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor dengan indikator persentase kegiatan statistik sektor yang rilis tepat waktu dengan target 80 persen, realisasi kinerja 100 persen dan kinerja keuangannya mencapai 97,84 persen.

1.1.2 Penyelenggaraan Statistik Sektor Yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dengan indikator jumlah kegiatan statistik sektor yang telah dilengkapi metadata dengan target 1 Kegiatan, realisasi kinerja hanya mencapai 0,06 persen dan kinerja keuangannya mencapai 6,45 persen.

1.1.3 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor sesuai standar dengan indikator jumlah statistik sektor yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik dengan target 1 dokumen, sub kegiatan ini tidak terlaksana karena pagu anggaran di alihkan ke sub kegiatan lain.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju melalui 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua).

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

1.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator Jumlah laporan monitoring pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah dengan target 12 laporan, terealisasi 12 laporan atau 100 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 98,52 persen.

1.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

1.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pada sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim 12 laporan, terealisasi 12 laporan atau 100 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 99,19 persen.

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju melalui 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.560.881.460,-. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tercapai realisasi keuangan sebesar Rp. 3.496.391.190,- atau 98,19%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kominfosip Kabupaten Mamuju tahun 2025 adalah **70,75** termasuk dalam kategori **BB**. Total nilai AKIP hasil

Evaluasi Implementasi SAKIP sama dengan dari tahun sebelumnya (2024) adalah **69,00**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, memiliki target kinerja 2 dokumen perencanaan perangkat daerah. Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 2 dokumen perencanaan perangkat daerah, sehingga tingkat capaiannya 100%. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kominfosip Kabupaten Mamuju Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja, tersedianya 2 dokumen yang meliputi : RENJA Pokok TA. 2026 dan RENJA Perubahan TA. 2025.

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD, memiliki target kinerja 2 dokumen. Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 2 dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kominfosip Kabupaten Mamuju Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja, tersedianya 2 dokumen, meliputi : RKA dan RKA-P Perangkat Daerah.

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-PD

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-PD, memiliki target kinerja 2 dokumen. Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 2 dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kominfosip Kabupaten Mamuju Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja, tersedianya 2 dokumen meliputi : DPA dan DPA-P PD.

1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki target kinerja 4 Laporan. Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 4 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan tersebut, tersedianya 4 Laporan yang meliputi : Evaluasi RENJA, LAKIP, LPPD dan LKPJ.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pembayaran gaji dan tunjangan ASN terealisasi 100% dengan terbayarkannya gaji dan tunjangan seluruh ASN Dinas selama 1 tahun dan tersedianya laporan keuangan yang akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, memiliki target kinerja 33 orang/bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN. Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 32 orang/bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, sehingga tingkat capaiannya 100%.

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, memiliki target kinerja 12 dokumen. Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 12 dokumen, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan tersebut dan tersedianya 12 dokumen pertanggungjawaban keuangan dalam setahun.

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran

PD, memiliki target kinerja 12 laporan. Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 12 laporan, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan tersebut dan tersedianya 12 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD dalam setahun.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD

Kegiatan dinas khususnya administrasi barang milik daerah ini tidak lepas dari kegiatan tata kelola barang milik daerah yang tersedia sesuai standar, dimana kegiatan ini menunjang aktivitas perkantoran berjalan baik. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 12 Laporan penatausahaan barang yang dimiliki Dinas Kominfosip dengan tingkat capaian 100%. Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan data barang milik daerah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Dinas Kominfosip.

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan dinas khususnya perkantoran tak lepas dari kegiatan pelayanan administrasi umum PD. Hal ini sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas perkantoran, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan baik.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

1.4.1 **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 1 paket Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sehingga tingkat capaiannya 100%. Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan kantor untuk menunjang kebersihan sarana dan prasarana yang baik selama 1 (satu) tahun.

1.4.2 **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 2 paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sehingga tingkat capaiannya 100%. Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah

tersedianya kebutuhan kantor untuk natura dan makanan minuman jamuan tamu yang baik selama 1 (satu) tahun.

1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 1 paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%. Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa penggandaan dokumen administrasi untuk kearsipan dan pencetakan spanduk/baliho untuk kegiatan, agar seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD

Realisasi kinerja yang dicapai yaitu 18 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD, sehingga tingkat capaiannya 100%. Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kecakupan kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi PD ke luar daerah dan dalam daerah yang baik selama 1 (satu) tahun.

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan dinas khususnya perkantoran tak lepas dari kegiatan pelayanan administrasi umum PD. Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas perkantoran, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan baik.

1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi kinerja yang dicapai 5 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%. Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa laptop dan printer dalam rangka memaksimalkan operasional kegiatan perkantoran.

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun pelayanan administrasi perkantoran meliputi kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Agar pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan perencanaan dan pendanaan setiap aktivitas dengan baik.

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi kinerja yang dicapai 12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%. Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan jasa Komunikasi seperti pembayaran tagihan jaringan wifi, pembayaran tagihan sumber daya air (PDAM) dan tagihan listrik kantor, dengan tujuan agar tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan pembayaran selama 1 (satu) tahun.

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi kinerja yang dicapai 12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan honorarium Supporting staf untuk kegiatan kantor lainnya, dengan tujuan agar tercapainya kelancaran 18 pelaksanaan kegiatan. Rincian supporting staf non PNS pada Diskominfo pada tahun 2025 adalah :

- 1) Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 8 orang,
- 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan 1 orang,
- 3) Tersedianya Jasa Supir 1 orang.

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Agar kegiatan perkantoran dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk setiap aktivitas dengan baik.

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi kinerja yang dicapai 7 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan selama 1 (satu) tahun yaitu 5 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4.

1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi kinerja yang dicapai 10 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa AC Split, Komputer PC/ Laptop dan Printer dalam rangka memperlancar operasional kegiatan perkantoran.

1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi kinerja yang dicapai 1 unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan bangunan gedung kantor untuk mendukung pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan, hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya Kebijakan Kepala Daerah baik itu Peraturan Bupati ataupun Peraturan Daerah terkait ekosistem SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) Kabupaten Mamuju.

4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab program, kegiatan dan sub kegiatan tidak tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya Kebijakan Kepala Daerah terkait Ekosistem/Arsitektur SPBE Kabupaten Mamuju menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan dan pengisian instrumen SPBE secara konferenship untuk dapat meningkatkan capaian indeks SPBE daerah;
- b. Membutuhkan SDM ASN atau Tenaga Ahli yang handal dalam hal tenaga IT untuk pengelolaan server/aplikasi dan Sandiman yang bersertifikasi sandiman untuk keamanan informasi;
- c. Belum terintegrasinya layanan internet Perangkat Daerah yang terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
- d. Belum tersedianya pejabat dan fungsional statistisi ditetapkan untuk menunjang urusan statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
- e. Belum memadainya bangunan gedung kantor serta sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja Pemerintah Daerah guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0 yang mendorong setiap pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program RENSTRA Perangkat Daerah

Capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun 2025, yaitu :

- a. Persentase informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat
- b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan antara lain :

1. Melakukan sinkronisasi data capaian kinerja secara akurat pada semua bidang yang bertanggungjawab terhadap capaian kinerja;
2. Dalam perencanaan target kinerja, diupayakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan pemahaman dasar tentang dokumen perencanaan baik dari Tingkat pemangku kebijakan tertinggi sampai pelaksana teknis kegiatan, sehingga dokumen perencanaan tidak dianggap hanya sebagai kelengkapan administratif agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat lebih terukur dan jelas;
4. Dalam Menyusun perencanaan dan penganggaran, perhatian utama bukan hanya pada proses dan penyerapan/pencairan anggaran, tetapi juga harus lebih memperhatikan factor-faktor penting dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja untuk menghindari permasalahan seperti :
 - a. Fokus kinerja tidak sesuai dengan indikator kinerja utama;
 - b. Target kinerja tidak berorientasi pada hasil/outcome;
 - c. Dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya tidak konsisten;
 - d. Cascading yang tidak tepat;
 - e. Indikator kinerja tidak dapat diukur secara obyektif dan tidak relevan;
 - f. Data capaian kinerja yang tidak konsisten sehingga mengakibatkan penentuan target kinerja terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunkasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: (*Tabel TC.29*)

Tabel 2.16
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2026
TABEL T-C.29.

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2025-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Targete Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
SASARAN PROGRAM										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat										
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
		2. Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
		3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100%	2	6	60%
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	2	2	2	100%	2	6	86%
2 16 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7	2	2	2	100%	2	6	86%
2 16 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	4	4	4	100%	12	20	33%
2.16.01.2.01 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	7500	0	0	0	0%	5000	5,000	67%
2.16.01.2.01 10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55	0	0	0	0%	11	11	20%

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2025-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Targte Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia								
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178	32	12	12	100%	41	85	48%
2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar								
2 16 01 2.03 05	Rekonsiliasai dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasai dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.03 08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2 16 01 2.05 02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100%	2	4	80%
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100%	2	6	60%
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	18	20	18	90%	23	59	98%

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2025-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Targte Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar								
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	0	0	0	0%	12	12	86%
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	5	5	5	100%	0	10	45%
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah								
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	7	7	7	100%	7	21	60%
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	10	10	10	100%	16	36	80%
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1	1	1	100%	1	3	75%

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2025-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Targete Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
SASARAN PROGRAM										
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
2 16 02 2.01 14	Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2 16 02 2.01 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	60	58	60	58	97%	60	60	100%
2 16 02 2.01 17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5	1	1	1	100%	0	2	40%
2 16 02 2.01 19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	30	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 02 2.01 20	Desiminasi Informasi	Persentase Khalayak yang terpapar Informasi Publik	100	95	100	95	95%	100	290	290%
2 16 02 2.01 23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1425	140	140	140	100%	12	292	20%
SASARAN PROGRAM										
Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien										
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
2 16 03 2.02 13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1	0	0	0	0%	0	0	0%
2 16 03 2.02 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	165	33	33	33	100%	0	66	40%
2 16 03 2.02 34	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2 16 03 2.02 37	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2	1	1	1	100%	0	2	100%
2 16 03 2.02 38	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Cerdas	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2 16 03 2.02 39	Koordinasi pengelolaan Data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2025-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Targte Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
SASARAN PROGRAM										
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100%	10%	10%	10%	100%	50%	70%	70%
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Setiap PD	100%	10%	10%	10%	100%	50%	70%	70%
2 21 02 2.01 18	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	0	0	0	0%	38.8	39	39%
2 21 02 2.01 22	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah	24	0	0	0	0%	12	12	50%
2 21 02 2.01 23	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	100	10	10	10	100%	0	20	20%
SASARAN PROGRAM										
Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	12%	12%	12%	100%	12%	36%	36%
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	12%	12%	12%	100%	12%	36%	36%
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan Keamanan Informasi	70	0	0	0	0%	0	0	0%
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim	100%	11%	11%	11%	100%	11%	33%	33%
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	111	12	12	12	100%	12	36	32%

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tabel 2.17
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Mamuju
TABEL T-C.32.

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Layanan Kepada Masyarakat

- TIDAK ADA -

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju harus sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju. Didalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2029 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju mendukung pencapaian Misi I (satu) yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional, sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut terdapat pada sasaran 2 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 adalah : **“Optimalisasi Pelaksanaan e-Government dengan Mewujudkan Transformasi Digital yang Aman Berbasis Data”** Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat;
 2. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien;
 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan;
 4. Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah; dan
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Tahun 2027

PD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU

No.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
1.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DENGAN MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL YANG AMAN BERBASIS DATA	S1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		S2 : Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		S3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		S4 : Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
		S5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 2. Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Administrasi Kegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3.2 Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun RENSTRA-KL dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam RENSTRA Tahun 2025 – 2029 sebagai leading sektor bidang komunikasi dan Informatika akan berfokus mempercepat transformasi digital nasional. Arah kebijakan ini dikemas dalam visi besar "**Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga**", dengan tiga pilar pembangunan utama :

- **Terhubung** : Membangun konektivitas digital yang inklusif, merata, dan cepat dari kota hingga ke desa.
- **Tumbuh** : Memberdayakan talenta digital, mendukung inovasi ekonomi/startup, serta mewujudkan sistem pemerintahan digital (*Citizen-Centric*) yang terpadu.
- **Terjaga** : Memastikan kedaulatan data bangsa, keamanan ruang digital, serta perlindungan data pribadi.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang berpedoman pada RPJMN menetapkan tujuan utama untuk menciptakan konektivitas digital inklusif yang bermakna, membangun ekosistem digital yang memberdayakan, serta mewujudkan ruang digital yang aman, terpercaya, dan berdaulat.

Indikator Tujuan KEMENKOMDIGI yaitu :

1. Indeks Transformasi Digital Nasional
2. Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi

Adapun Sasaran Strategis pembangunan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 disusun dengan 9 fokus utama yaitu :

1. Mempercepat penyediaan konektivitas broadband inklusif, berkualitas, dan terjangkau;
2. Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional;
4. Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital;

5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric;
6. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi;
8. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
9. Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien.

Beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas digital, meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Faktor yang menjadi penghambat adalah untuk tahun pertama operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sarana dan prasarana komunikasi yang terbatas, sehingga pada akhirnya penyampaian informasi kepada publik tidak akan berjalan efisien dan aman. Begitupun terhadap akses masyarakat terhadap informasi belum sepenuhnya mengcover seluruh kecamatan. Ada 4 Kecamatan dalam wilayah kabupaten Mamuju yakni Kecamatan Bonehau, Kalumpang, Bala-Balakang dan sebagian Desa di Kecamatan Tommo yang masih susah aksesnya dalam komunikasi melalui telepon dan internet.

Sedangkan berdasarkan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 memiliki tujuan yaitu : **Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital.** Dan berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
3. Menurunnya Blankspot Area;
4. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Statistik Sektoral;
5. Meningkatnya Keamanan Informasi Digital Pemerintahan

1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, serta tema pembangunan daerah tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.
- b. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development* (TPB/SDGs)

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 dengan melaksanakan 5 (lima) program, meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Program Aplikasi Informatika
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 terdiri dari 5 program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 2.913.766.658,-** yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2027. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang dengan rincian :

1. **Sekretariat**, menjalankan tugas pelayanan teknis dan administratif serta pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 5. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
 - 6. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan
 - 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Bidang Komunikasi Informasi Publik dan Bidang Sarana Diseminasi Informasi**, menjalankan tugas penyelenggaraan pengelolaan sarana dan diseminasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, melalui :

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Relasi Media;
 2. Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 3. Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik;
 5. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
 6. Penyusunan Konten.
- 3. Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital**, menjalankan tugas melaksanakan pengembangan Application Program Interface (API) dan pengelolaan e-Government, melalui :

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

 - a. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
 1. Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi Tata Kelola, Manajemen SPBE dan Audit TIK;
 2. Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi;
 3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota.

4. Bidang Statistik, menjalankan tugas pengelolaan data perlindungan informasi, melalui :

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - 3. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional.

5. Bidang Persandian, menjalankan tugas pengelolaan data perlindungan informasi, melalui :

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap Rancangan Akhir RKPD 2027. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian banyak yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang sudah jelas. Adapun pada tahun 2027 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengusulkan 5 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Hasil review terhadap RKPD tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
TABEL T-C.31.

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SASARAN PROGRAM											
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat											
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%		
			2. Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat	100%				2. Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat	100%		
			3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor	100%				3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor	100%		
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Mamuju	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Mamuju	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%		
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,226,000	
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,158,000	
2 16 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,032,000	
2 16 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	900,000	
2 16 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	840,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1,050,000	
2 16 01 2.01 08	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Kab. Mamuju	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6.000 Data	1,500,000	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Kab. Mamuju	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6.000 Data	1,625,000	
2 16 01 2.01 09	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Berita Acara	1,500,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Berita Acara	1,060,000	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	100%		
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	2,891,689,163	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	444 Orang/ Bulan	2,075,466,658	
2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	86,026,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	98,860,000	
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	525,000	
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	12 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	12 Dokumen	1,310,000	
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100%		

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2,500,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
2 16 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,160,000	
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		
2 16 01 2.05 02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	25,000,000	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	0	
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	612,000	
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,500,000	
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,200,000	
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,244,000	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	902,000	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	26,055,000	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100%		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100%		
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	65,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	102,199,000	
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Mamuju	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Mamuju	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%		
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	266,348,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	222,188,000	untuk penambahan kapasitas bandwidth dalam operasional server, website pemda dan jaringan internet
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,200,000	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	18,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	20,440,000	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	30,874,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	11,600,000	
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5,250,000	
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,066,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SASARAN PROGRAM											
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat											
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Mamuju	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Mamuju	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%		
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100%		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100%		
2 16 02 2.01 14	Relasi Media	Kab. Mamuju	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	12 Laporan	200,000,000	Relasi Media	Kab. Mamuju	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	12 Laporan	720,375,000	
2 16 02 2.01 25	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kab. Mamuju	Persentase Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan Perundangan	100 Persen	3,500,000	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kab. Mamuju	Persentase Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan Perundangan	100 Persen	1,191,000	
2 16 02 2.01 26	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persen	50,000,000	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	196.423 Orang	3,180,000	
2 16 02 2.01 29	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	25,000,000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Kab. Mamuju	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	250,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 02 2.01 31	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Mamuju	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	60,000,000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Mamuju	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	60 Komunitas	1,920,000	
2 16 02 2.01 32	Penyusunan Konten	Kab. Mamuju	Jumlah Konten Informasi Publik	280 Konten	68,000,000	Penyusunan Konten	Kab. Mamuju	Jumlah Konten Informasi Publik	280 Konten	15,538,000	
SASARAN PROGRAM											
Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien											
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%		Pada rancangan awal RKPD tahun 2025 ini belum diperhitungkan anggaran untuk Ekosistem Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Mamuju, karena mengingat sangat pentingnya Ekosistem Arsitektur SPBE ini untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE Kabupaten Mamuju pada Khususnya guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, mendorong setiap pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat meningkatkan
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	100%		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	100%		
2 16 03 2.02 41	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Kab. Mamuju	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Kab. Mamuju	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	2,650,000	
2 16 03 2.02 42	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Kab. Mamuju	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	25 Layanan	65,000,000	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Kab. Mamuju	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	25 Layanan	27,324,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 16 03 2.02 43	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	33 Titik	85,900,000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	33 Titik	4,200,000	dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
SASARAN PROGRAM											
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan berbasis elektronik											
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Mamuju	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Mamuju	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100%		
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Setiap PD	100%		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Setiap PD	100%		
2 20 02 2.01 18	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	90%	10,700,000	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	40%	1,908,000	
2 20 02 2.01 22	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Mamuju	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	12 Laporan	25,000,000	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Mamuju	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	12 Laporan	10,550,000	
2 20 02 2.01 23	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	90%	12,000,000	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	40%	696,000	
SASARAN PROGRAM											
Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah											
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Mamuju	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Mamuju	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%		

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%		
2 21 02 2.01 10	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 Laporan	5,000,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	5,316,000	
2 21 02 2.01 07	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	55 Perangkat Daerah	25,000,000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	0 Perangkat Daerah	0	
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota										
2 21 02 2.02 02	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	15 Kegiatan	16,000,000	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	0 Kegiatan	0	
Total					4,402,437,163						3,413,766,658

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Catatan Penting :

Pada Rancangan Akhir RKPD tahun 2027 ini belum diperhitungkan anggaran untuk pembiayaan pembuatan Ekosistem Arsitektur SPBE/PEMDI Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Hal ini perlu menjadi Catatan Penting bagi kami mengingat begitu dibutuhkannya Ekosistem Arsitektur SPBE/PEMDI ini untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE/PEMDI Kabupaten Mamuju di tahun mendatang yang memang penilaiannya dilakukan secara periodik setiap tahunnya dan pada khususnya guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, yang mensyaratkan setiap Pemerintah Daerah untuk segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) – Pemerintahan Digital (PEMDI) secara komprehensif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kedalam rencan kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kegiatan yang dipilih untuk setiap kegiatan prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA- Perangkat Daerah
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - e. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
 - f. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan PNS
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kegawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

- 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Relasi Media;
 - b. Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - c. Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - d. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik;
 - e. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
 - f. Penyusunan Konten.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- 1. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi Tata Kelola, Manajemen SPBE dan Audit TIK;
 - b. Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi;
 - c. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional.

e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 di ukur dengan target capaian kinerja yang sudah ditetapkan pada tiap Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029, baik Capaian Kinerja maupun Realisasi Anggaran.

Rumusan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran, Indikator Kinerja Hasil (*Outcome*) Program, Keluaran (*Output*) Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Pendanaan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabuapten Mamuju Tahun 2027 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
TABEL T-C.33.

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028																																										
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif																																								
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA & PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU									3,413,766,658														4,330,037,163																										
SASARAN PROGRAM																																																						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat																																																						
PROGRAM RUTIN															2,618,668,658															3,654,837,163																								
2	16				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																																	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 2.Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 3.Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju	100%	2,618,668,658							1.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 2.Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 3.Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor	100%	3,654,837,163																																				
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	100%	8,891,000					DAU		Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	25,500,000																																				
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	2 Dokumen	1,226,000					DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000																																				
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	1,158,000					DAU		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000																																				
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	1,032,000					DAU		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000																																				
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	900,000					DAU		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,500,000																																				
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	840,000					DAU		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000																																				
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	12 Laporan	1,050,000					DAU		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5,000,000																																				
2	16	01	2.01	09	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Mamuju	6.000 Data	1,625,000					DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.000 Data	1,500,000																																				

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	16	01	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	11 Berita Acara	1,060,000	DAU		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Berita Acara	1,500,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	Kab. Mamuju	100%	2,176,161,658	DAU		Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	100%	3,000,215,163
2	16	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju	444 Orang/ Bulan	2,075,466,658	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	2,891,689,163
2	16	01	2.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penasusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	12 Dokumen	98,860,000	DAU		Jumlah Dokumen Penasusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	86,026,000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mamuju	1 Laporan	525,000	DAU		Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	2,500,000
2	16	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju	12 Dokumen	1,310,000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	20,000,000
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Kab. Mamuju	100%	6,160,000	DAU		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100%	12,000,000
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	12 Laporan	6,160,000	DAU		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12,000,000
2	16	01	2.05		Administrasi Kegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	100%	612,000	DAU		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	15,000,000
2	16	01	2.05	09	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mamuju	1 Dokumen	612,000	DAU		Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	15,000,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	100%	32,901,000	DAU		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	172,000,000
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	1 Paket	1,500,000	DAU		Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kab. Mamuju	1 Paket	1,200,000	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2 Paket	2,000,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	2 Paket	3,244,000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15,000,000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju	1 Paket	902,000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	6 Laporan	26,055,000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	150,000,000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Kab. Mamuju	100%	102,199,000	DAU		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100%	65,000,000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju	3 Unit	102,199,000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	65,000,000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	100%	247,388,000	DAU		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	302,348,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 Laporan	222,188,000	DAU	untuk penambahan kapasitas bandwidth dalam operasional server, website pemda dan jaringan internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262,348,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 Laporan	25,200,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40,000,000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Mamuju	100%	44,356,000	DAU		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	62,774,000
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Mamuju	1 Unit	20,440,000	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	18,000,000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mamuju	6 Unit	11,600,000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	30,874,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju	10 Unit	5,250,000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8,900,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mamuju	1 Unit	7,066,000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN PROGRAM														
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat														
PROGRAM TEKNIS									795,098,000			675,200,000		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	100%	742,454,000	DAU		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%	406,500,000
2	16	02		2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	100%	742,454,000	DAU		Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100%	406,500,000
2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	Kab. Mamuju	12 Laporan	720,375,000	DAU		Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	12 Laporan	200,000,000
2	16	02	2.01	25	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Mamuju	100 Persen	1,191,000	DAU		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Persen	3,500,000
2	16	02	2.01	26	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Mamuju	196.423 Orang	3,180,000	DAU		Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	196.423 Orang	50,000,000
2	16	02	2.01	29	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan	Kab. Mamuju	10 Rekomendasi	250,000	DAU		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan	10 Rekomendasi	25,000,000
2	16	02	2.01	31	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Mamuju	60 Komunitas	1,920,000	DAU		Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	100%	60,000,000
2	16	02	2.01	32	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Mamuju	280 Konten	15,538,000	DAU		Jumlah Konten Informasi Publik	280 Konten	68,000,000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
SASARAN PROGRAM														
Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien														
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Kab. Mamuju	100%	34,174,000	DAU	Pada rancangan awal RKPD tahun 2027 ini belum diperhitungkan anggaran untuk Ekosistem Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Mamuju, karena mengingat sangat pentingnya Ekosistem Arsitektur SPBE ini untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE Kabupaten Mamuju pada Khususnya guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, mendorong setiap pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat meningkatkan kualitas	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%	200,000,000
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	Kab. Mamuju	100%	34,174,000	DAU		Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	100%	200,000,000
2	16	03	2.02	41	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) Yang Meliputi Tata Kelola, Manajemen SPBE dan Audit TIK	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Kelola SPBE yang Meliputi Arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital) serta hasil audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Mamuju	1 Dokumen	2,650,000	DAU		Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Kelola SPBE yang Meliputi Arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital) serta hasil audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	85,000,000
2	16	03	2.02	42	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Layanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Layana Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Kab. Mamuju	25 Layanan	27,324,000	DAU		Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Layanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Layana Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	25 Layanan	65,000,000
2	16	03	2.02	43	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah peerangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Mamuju	33 Titik	4,200,000	DAU		Jumlah peerangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	33 Titik	50,000,000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SASARAN PROGRAM															
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan berbasis elektronik															
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										47,700,000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	Kab. Mamuju	100%	13,154,000	DAU		Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100%	47,700,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Setiap PD	Kab. Mamuju	100%	13,154,000	DAU		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Setiap PD	100%	47,700,000	
2	20	02	2.01	09	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode	Kab. Mamuju	40%	1,908,000	DAU		Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode	40%	10,700,000	
2	20	02	2.01	10	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah	Kab. Mamuju	12 Laporan	10,550,000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah	12 Laporan	25,000,000	
2	20	02	2.01	11	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik Pusat dan/atau Daerah	Kab. Mamuju	40%	696,000	DAU		Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik Pusat dan/atau Daerah	40%	12,000,000	
SASARAN PROGRAM															
Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah															
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2	21	01			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	100%	5,316,000	DAU		Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	21,000,000	
2	21	01	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	100%	5,316,000	DAU		Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	21,000,000	
2	21	01	2.01	10	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Mamuju	12 Laporan	5,316,000	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	21,000,000	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

4.2 Rencana Kerja Untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah

Tabel 4.3
Pentahapan RENSTRA
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Fondasi yang berfokus pada pembangunan dasar-dasar yang kuat untuk transformasi digital, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia	Integrasi dan Sentralisasi dengan mengkonsolidasikan data dari berbagai Perangkat Daerah (PD) ke dalam satu pusat data yang aman dan terpusat, mengembangkan dan menerapkan standar tata kelola data yang seragam untuk semua Perangkat Daerah (PD) dan memastikan data yang dikumpulkan valid, bersih, dan dapat dibagikan	Integrasi dan Sentralisasi dengan mengkonsolidasikan data dari berbagai Perangkat Daerah (PD) ke dalam satu pusat data yang aman dan terpusat, mengembangkan dan menerapkan standar tata kelola data yang seragam untuk semua Perangkat Daerah (PD) dan memastikan data yang dikumpulkan valid, bersih, dan dapat dibagikan	Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan berfokus pada pemanfaatan data untuk inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik	Penguatan Keamanan dan Keberlanjutan berfokus pada penguatan aspek keamanan dan memastikan keberlanjutan dari transformasi digital yang telah dilakukan

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Tabel 4.4
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Pemerintah Secara Digital (Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik)	2.16.03.2.02 Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Tabel 5.1
Indikator Kinera Utama (IKU)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

NO	INDIKATOR (tujuan/sasaran strategis)	SATUAN	TARGET KINERJA						REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	
	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Nilai	2.50	2.75	2.80	2.85	2.90	3.00	2.63	-	100	100	Skor Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun Berjalan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													
1	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	65	70	75	80	85	90	100	-	100	100	$\text{Persentase Keterbukaan Informasi} = \frac{\text{Jumlah Indikator / Standar KIP Yang Terpenuhi}}{\text{Total Indikator / Standar KIP Yang Harus Dipenuhi}} \times 100 \%$
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	50	60	70	80	90	100	50	-	100	100	$\text{Persentase Layanan Online Terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah Layanan Publik Diskominfo yang Online dan Terintegrasi}}{\text{Total Layanan Publik Diskominfo Wajib/Potensial Untuk Didigitalisasi}} \times 100 \%$
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik													
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	1.94	2.00	2.15	2.25	2.45	2.75	-	-	100	100	Skor Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sentoral (EPSS) pada Tahun Berjalan
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian													
4	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	50	60	70	80	90	100	93	-	100	100	$\text{Persentase Penyelenggaraan Persandian} = \frac{\text{Jumlah Program/Sistem Keamanan Yang Sudah Terlaksana}}{\text{Total Target Yang ditetapkan}} \times 100 \%$
Unsur Perencanaan													
5	Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A	A	AA	AA	BB	-	100	100	Skor Hasil Evaluasi AKIP

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		Catatan Analisis
			2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	KIM										$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi											$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen										$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet											$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi											$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada/ Tidak
7	Buku "kabupaten dalam angka"		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada/ Tidak
8	Buku "PDRB"		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada/ Tidak
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												
9	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen										$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100$

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

BAB VI

PENUTUP

Rancangan Akhir RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 merupakan dokumen awal perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk periode 1 Tahun yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, hasil evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 dan Tahun 2026.

RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 berpedoman pada RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta Prakiraan Maju yang disusun dalam RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 dengan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 ini digunakan sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju. Oleh sebab itu betapa pun sederhananya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat di implementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

6.1 Catatan Penting

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 antara lain :

1. Target capaian kinerja dari semua indikator kinerja dalam rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2027 sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Evaluasi rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan meliputi kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja, Lokasi Pelaksanaan, Kelompok Sasaran, Sumber Pendanaan, dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan terbaru;
3. Fokus utama pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan capaian kinerja, bukan sekedar menitikberatkan pada realisasi/penyerapan anggaran;
4. Pengelohan dan pengelolaan data kinerja yang bersifat pasti, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan yang berkelanjutan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama internal, lintas instansi pemerintah, instansi swasta, maupun sektor informal yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan kinerja;
6. Pada Tahun 2027 diharapkan penganggaran untuk penyelesaian ekosistem Arsitektur SPBE Kabupaten Mamuju.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 dilaksanakan secara tertib, obyektif dan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju secara periodik dan berkesinambungan guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029;

3. RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 merupakan pedoman dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah selama pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027, perubahan rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terjadi akan di muat dalam perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2027 antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Mamuju;
2. Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik sehingga transparansi terhadap program pemerintahan menjadi lebih baik;
3. Peningkatan kualitas keamanan informasi pemerintah Kabupaten Mamuju;
4. Peningkatan cakupan data pada Satu Data Indonesia secara update, akurat dan terintegrasi.



*Pemerintah Kabupaten Mamuju
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian*



<https://diskominfosip.mamujukab.go.id>



@diskominfosip_mamuju



Diskominfosip Kabupaten Mamuju

